

**Annual Report
LPPI
2017**



Jl. Kemang Raya No. 35,
Jakarta Selatan 12730
PO. Box 6708/JKSRB

Telp. (62-21) 7179 0919
Fax. (62-21) 7195 409

www.lppi.or.id



Kerja Keras, Kerja Cerdas Menyongsong Perubahan

Laporan Tahunan 2017





Jl. Kemang Raya No. 35,
Jakarta Selatan 12730
PO. Box 6708/JKSRB

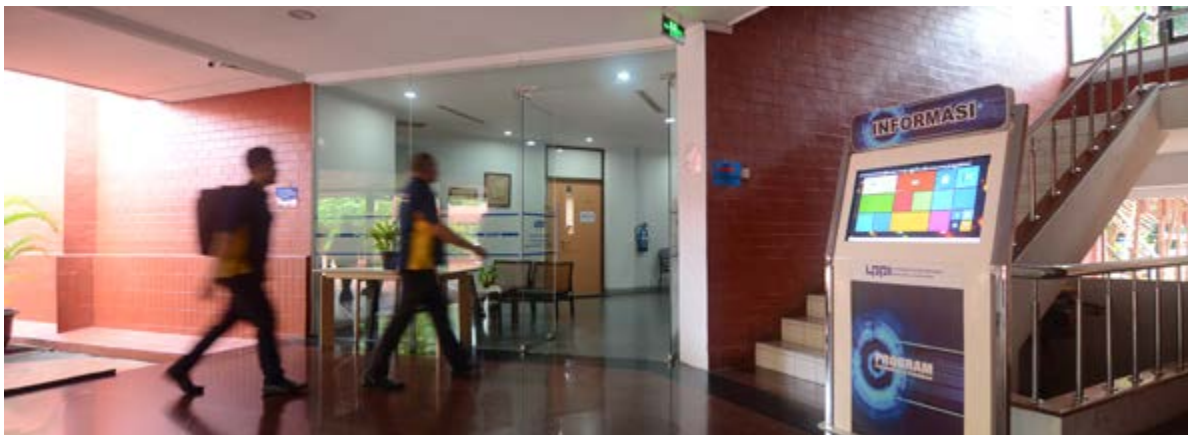
Telp. (62-21) 7179 0919
Fax. (62-21) 7195 409

www.lppi.or.id

Kerja Keras, Kerja Cerdas Menyongsong Perubahan

Laporan Tahunan 2017

Daftar Isi



Cerita Sampul	4
Kata Sambutan	6
Dewan Direksi	11
Visi dan Misi	12
Rencana Strategis	13

Ikhtisar Penting

01

Data - Data Penting	15
Peserta Pelatihan 2013-2017	16



Sekilas LPPI

02

Riwayat Singkat 1958-2017	23
Profil Dewan Direksi	27
Profil Staf Ahli	30
Profil Fakultas Kehormatan	32
Sejarah Penting	34
Ringkasan Kegiatan Utama	36

Tata Kelola Perusahaan

03

KIPRAH & Kebijakan Mutu GESIT	39
Tata Kelola	41
Re-Sertifikasi ISO 9001:2015	43
Tugas dan Fungsi	44



Fungsi Dan Pendukung & Bisnis

04

Teknologi Informasi	51
Sumber Daya Manusia	55
Pengajar Eksternal	58
Fasilitas	59

Laporan Kegiatan

05

Kegiatan Utama	65
Lintasan Peristiwa 2017	82



Tanggung Jawab Sosial LPPI

06

Kegiatan Sosial LPPI 2017	87
---------------------------	----

Daftar Pelanggan

07

Pelanggan LPPI	89
Kerjasama Internasional	93

Laporan Keuangan

08

Laporan Keuangan (Unaudited)	94
------------------------------	----

Sespibank merupakan pelatihan unggulan yang dimiliki oleh LPPI yang sudah melahirkan banyak pemimpin bank. Direktur utama LPPI Bapak Hartadi A. Sarwono dan sesepuh LPPI Bapak Rachmat Saleh berfoto bersama peserta Sespibank® di Taman Foto.



Kerja Keras, Kerja Cerdas Menyongsong Perubahan

Perjalanan industri keuangan sepanjang 2017 ini memang penuh dengan tantangan, terutama dengan perkembangan praktik digital yang semakin marak. Namun demikian, kemampuan para manajer dan juga pemimpin di perbankan dalam menghadapi tantangan itu mampu membawa industri perbankan keluar dari tekanan dengan mampu mencatatkan kinerja yang baik.

Sejak krisis 1997-1998 berlalu, para bankir telah membekali dan memperkaya diri mereka dengan pengetahuan dan kemampuan yang lebih luas mengenai ekonomi dan juga risiko-risiko yang akan dihadapi. Sejalan dengan kebijakan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan OJK sudah mendorong industri untuk makin agresif dalam mengedepankan strategi *combined assurance* yaitu *governance*, *risk management* dan *compliance* sebagai tiga sisi yang tidak terpisahkan dalam mengelola perubahan yang berisi risiko di industri keuangan. Dalam dunia bisnis, kemampuan sebuah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan adalah kunci untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Jika faktor Perubahan (Change/ C) dan faktor kemampuan belajar (Learning/L), maka perusahaan harus memperbesar faktor L untuk menghadapi faktor C. Jika L sebuah perusahaan lebih rendah dari C maka perusahaan itu akan kolaps. Perusahaan akan tumbuh dan maju jika L lebih besar dari C, sementara perusahaan hanya akan bertahan jika L sama dengan C.

Berpedoman kepada hal tersebut, LPPI, sebagai lembaga pendidikan di sektor keuangan yang terkemuka, terus bekerja keras meningkatkan layanan yang mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman, dengan berbagai inovasi yang cerdas. Kesemuanya itu akan kami lakukan tanpa harus mengorbankan integritas yang sudah mendarah daging dalam memberikan layanan pendidikan dan pelatihan.

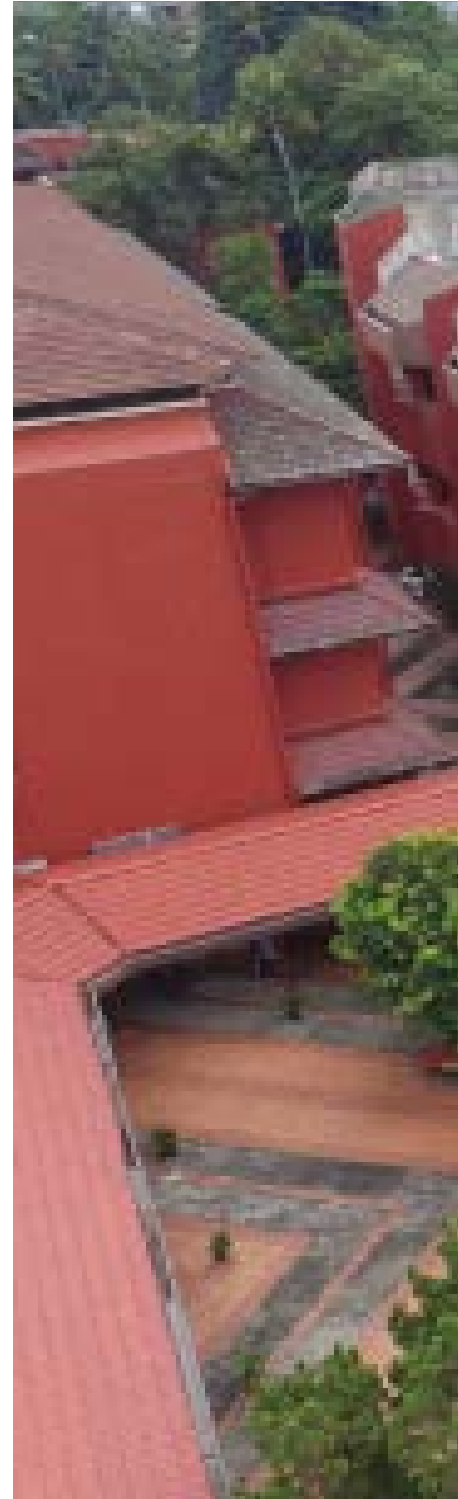
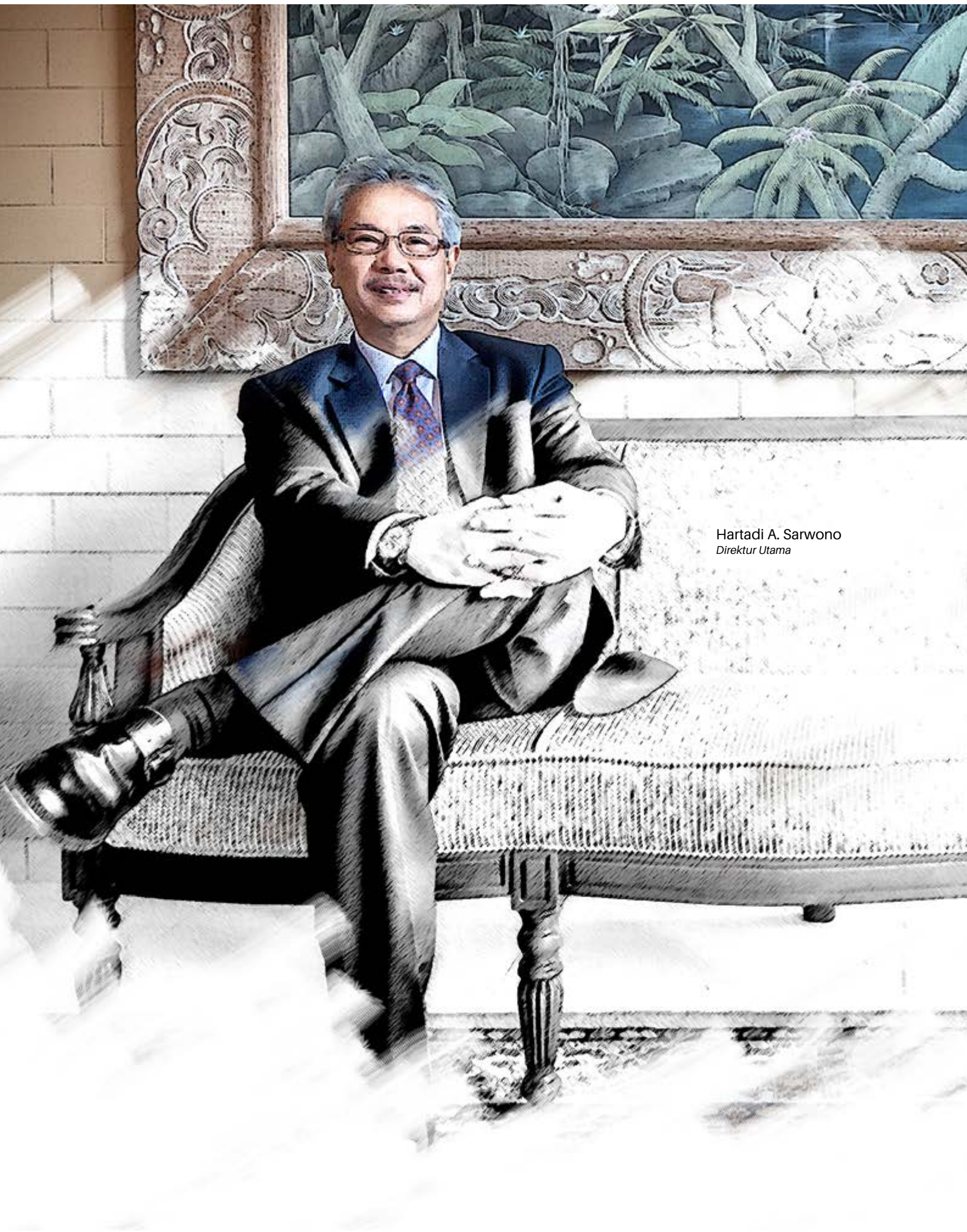




Foto ruang terbuka gedung LPPI tampak atas



Hartadi A. Sarwono
Direktur Utama



Kata Sambutan

*Assalamualaikum
Warahmatullah Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa yang sudah memberikan banyak anugerah dan nikmat kepada kita semua. Suatu kebanggaan bagi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dapat melaporkan ringkasan kinerjanya selama satu tahun kepada para pemangku kepentingan melalui laporan tahunan ini. Juga menjadi kehormatan bagi Saya ditunjuk untuk memimpin lembaga ini sehingga dapat terlibat langsung dalam perjalanan sejarah lembaga ini.

Ini adalah laporan tahunan yang pertama kali disusun dan dipublikasikan oleh LPPI sepanjang 59 tahun perjalanannya mewarnai industri perbankan dan keuangan, terutama dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Tahun 2017 yang sudah kita jalani, merupakan tahun yang menantang bagi industri perbankan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di level 5,01 persen dalam tiga kuartal pertama tahun 2017 membuat industri perbankan harus berjuang ekstra keras mempertahankan pertumbuhan bisnisnya. Sepanjang tahun 2017 Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 5,1 persen dan tahun 2018 akan mencapai kisaran 5,1-5,5 persen. Sementara kredit pada 2017 diperkirakan akan tumbuh sekitar 8 persen dan akan kembali meningkat menjadi 10-12 persen pada 2018.

Tantangan itu juga terlihat di sisi moneter maupun fiskal, di mana Indonesia masih sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global. Saat ekonomi global bergejolak, maka dampaknya akan terasa pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pemulihan ekonomi global saat ini masih berlangsung lambat dan tidak merata. Hal ini dapat dilihat pada perekonomian AS yang diperkirakan tumbuh lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, sementara di Eropa dan India diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.

Kondisi yang menantang itu pun dirasakan oleh industri perbankan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh LPPI, suku bunga kredit perbankan pada tahun 2018 dapat lebih rendah dibanding tahun 2017. *Net Interest Margin* (NIM) rata-rata yang masih tinggi dan menjadi tumpuan perbankan nasional karena penurunan suku bunga *reverse repo*, akan semakin sulit pada masa mendatang. Level NIM perbankan nasional saat ini berada di level 5,3 % lebih tinggi dibanding dengan negara kawasan.

Selain itu, di dalam kondisi persaingan perbankan saat ini, NIM perbankan masih terlalu tinggi sehingga tidak kompatibel dengan usaha mendorong ekonomi nasional. Dari sisi rentabilitas, LPPI melihat rata-rata tingkat efisiensi bank atau BOPO adalah sebesar 82,5 % namun masih ada sekitar 25 bank konvensional (20%) yang masih beroperasi dengan efisiensi

Komitmen LPPI diwujudkan dengan memberikan layanan terbaik bagi peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan industri keuangan melalui program pendidikan dan pelatihan serta konsultasi & asesmen, yang didasarkan pada hasil riset/penelitian.

yang rendah (BOPO di atas 90%). Sementara dari sisi permodalan, rata-rata rasio CAR perbankan berada pada level 20,32%.

Perbankan juga menghadapi tantangan yang sudah muncul sejak 2016 lalu, ketika Indonesia menyepakati perjanjian pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perjanjian yang diinisiasi para pemimpin ASEAN Desember 1997 silam untuk membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara itu bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian agar daya saing ASEAN meningkat dan utamanya dapat menandingi Cina dan India dalam menarik investasi luar. Konsekuensinya arus perdagangan dan arus tenaga kerja terbuka lebar dan akan mengalir bebas di kawasan ASEAN.

Tantangan terberat MEA untuk ketenagakerjaan adalah komitmen memberikan kesempatan bagi pekerja asing yang ingin masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Mau tidak mau hal ini akan menimbulkan persaingan bagi tenaga kerja Indonesia di bursa tenaga kerja yang akan mempengaruhi kesempatan karir. Masuknya tenaga kerja asing akan mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia dalam negeri.

Selain itu, industri perbankan juga menghadapi tantangan terkait penerapan *ASEAN Banking Integrated Framework* (ABIF) yang lahir sebagai bagian dari MEA. Pada 2011, ABIF dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan

kehadiran dan peran bank negara-negara di kawasan ASEAN. Kerangka tersebut berupaya meningkatkan kehadiran dan peran bank di ASEAN melalui pengurangan hambatan dalam akses pasar dan pengurangan hambatan dalam operasional bank.

Dengan beragam tantangan di atas, maka pelaku bisnis perbankan dan sektor keuangan sejatinya sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas tenaga kerja. Telah banyak pelatihan digelar untuk mempersiapkan tenaga kerja kita menjadi profesional-profesional handal di bidangnya masing-masing. Sejalan dengan itu dibutuhkan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.

LPPI sebagai lembaga yang *concern* pada pengembangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia menganggap penting kesiapan SDM perbankan menghadapi liberalisasi sektor keuangan lewat kesepakatan MEA. LPPI terus berupaya untuk turut serta mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional baik di industri keuangan bank dan non bank sehingga mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebagai *Center for Leadership and Ethics* yang telah dikukuhkan tanggal 24 Mei 2014 oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia, LPPI berharap dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan perbankan yang merupakan salah satu unsur penting dalam ketahanan ekonomi negara. Komitmen LPPI diwujudkan dengan

memberikan pelayanan yang terbaik bagi peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan industri keuangan melalui program pendidikan dan pelatihan serta konsultasi & asesmen, yang didasarkan pada hasil riset/penelitian. LPPI juga turut berperan dalam membantu industri perbankan dalam menyiapkan bankir-bankir dari setiap tingkatan manajemen melakukan sertifikasi kompetensi. Sebut saja, *inhouse training* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 untuk pegawai Kementerian Keuangan. Atau ketika melakukan Pembekalan Sertifikasi General Banking Level 1 untuk bank-bank BUMN. Bahkan lebih dari itu, LPPI sendiri telah menyertifikasi sebagian besar karyawannya dalam hal manajemen risiko. Hal itu membuktikan bahwa LPPI memiliki *kepedulian* yang besar untuk berperan serta dalam peningkatan kompetensi SDM di industri perbankan nasional.

Untuk pengembangan SDM perbankan di daerah khususnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD), LPPI memiliki komitmen lebih untuk mendukung peningkatan kualitas SDM BPD sebagai wujud dari pelaksanaan strategi Program Transformasi BPD yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo 26 Mei 2015. Tujuan Program Transformasi BPD ini adalah agar BPD menjadi bank yang mampu bertahan menghadapi tekanan dan berdaya saing tinggi, serta kuat serta mampu berkontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi daerah.

Sepanjang tahun 2017 yang terhitung sampai dengan Desember 2017, LPPI telah melaksanakan program diklat reguler sebanyak 96 program dan untuk program diklat *in-house* sebanyak 160 program.

LPPI juga telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan mendapatkan Sertifikat ISO-9001:2008 dari Badan Sertifikasi PT. SAI Global Indonesia sejak Desember 2011. Lalu pada tanggal 17 Agustus 2013 Sertifikat ISO LPPI telah mencakup seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan LPPI. Kemudian pada bulan Oktober 2014, dalam rangka re-sertifikasi,

LPPI berhasil mempertahankan kinerja sistem manajemen mutu dengan hasil audit dari SAI Global tanpa adanya temuan, sehingga sertifikat ISO yang baru berlaku sejak Desember 2014 sampai dengan Desember 2017 telah diperoleh kembali.

LPPI sendiri terus menerus membangun kapasitas dirinya untuk menjadi "*ASEAN Quality Financial Sector Training Institute*". LPPI tidak lagi bekerja sekedar "*business as usual*", namun telah mempersiapkan dan membekali diri untuk membangun keunggulan intinya yang memiliki *competitive advantage* yang telah dituangkan dalam rencana strategis lembaga. Sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak dalam pengembangan sumber daya manusia di industri keuangan, LPPI berusaha membangun dirinya menjadi organisasi yang efektif dengan SDM yang memiliki nilai-nilai strategis agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Penyempurnaan juga secara berkesinambungan dilakukan dalam hal *policy, product, system, business process* dan *people*. Setiap insan LPPI didorong terus untuk berubah, berpikir yang lebih kreatif (*out of the box*), cara kerja yang lebih berdaya saing dengan lembaga lain serta bekerja berani mendobrak cara lama (*complecancy*).

LPPI memprediksi, ke depan, transaksi keuangan *financial technology (fintech)* di Indonesia akan terus meningkat. Pada 2016 angkanya mencapai Rp188,5 triliun dan pada tahun ini berpotensi mencapai Rp250 triliun, terutama pada transaksi pembayaran atau *payment channel*. Sementara itu transaksi *peer to peer lending* walaupun masih kecil dan bersifat retail, namun karena kecepatan pelayanannya dan kemudahan transaksi (*user friendly*), akan menjadi pesaing serius bagi perbankan terutama untuk segmen *retail banking*.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkembangan teknologi generasi keempat ini telah mengubah perilaku pasar dan konsumen. Dari sini juga muncul beragam inovasi teknologi baru dengan platform berbasis *cloud*

computing, penggunaan *big data* dan *artificial intelligence*.

Perkembangan ekonomi makro, mikro dan *financial technology* tentu menjadi tantangan tersendiri bagi LPPI untuk berperan meningkatkan kompetensi para bankir dalam mengadopsi perkembangan teknologi. Sebagai lembaga yang sudah berpengalaman selama 59 tahun dalam menyelenggarakan beragam pendidikan dan pelatihan berkualitas, LPPI selalu merasa terpanggil untuk terus mempersembahkan pendidikan-pelatihan, riset, konsultasi, *workshop*, seminar yang terbaik yang dibutuhkan industri perbankan dan keuangan. Terutama untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat berkompetisi dalam

MEA dan ABIF 2020.

Oleh karena itu, tahun 2017 ini Kami kira merupakan waktu yang tepat untuk menyematkan tema "Kerja Keras, Kerja Cerdas dalam Menyongsong Perubahan" di dalam Laporan Tahunan LPPI, dengan harapan bahwa kami akan terus dapat memberikan yang terbaik dalam berkontribusi bagi perkembangan industri jasa keuangan sekaligus untuk perekonomian bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhai dan meringankan langkah kita bersama.

Wassalamualaikum Wr Wb

Hartadi Agus Sarwono
Direktur Utama LPPI

Dewan Direksi



Krisna Wijaya
Direktur

Wimboh Santoso
Direktur

Hartadi A. Sarwono
Direktur Utama

Suwartini
Direktur

Rizal Anwar Djaafara
Direktur

Visi dan Misi



Visi. Menjadi lembaga pengembangan perbankan dan jasa keuangan yang terpercaya dan terkemuka di Tanah Air, serta mendapat pengakuan internasional.

Misi.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perbankan dan jasa keuangan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (*knowledge, skill, attitude*).
2. Membantu Bank Indonesia dan pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengembangkan industri perbankan dan jasa keuangan yang sehat dan berkualitas.
3. Sebagai *center for leadership and ethics* untuk industri perbankan dan jasa keuangan.

Rencana Strategis



VISI & MISI

Organization Development 2016 - 2017

- Memperkuat Pusat Kajian Keuangan Mikro dan Pusat Kajian Manajemen Risiko
- Memperkuat pelatihan, konsultasi dan riset keuangan syariah
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi *faculty member*
- *Strategic Alliances*
- Review kurikulum
- Penyempurnaan struktur organisasi
- *Branding* melalui kegiatan seminar nasional dan internasional

Hasil Akhir

Memiliki kapabilitas organisasi dan kompetensi baru

New Image 2018 - 2019

- *Branding* dengan memperbanyak seminar internasional khususnya *microfinance* dan syariah
- Memperluas *Mitra Strategic Alliances*
- Membangun *Customer Relationship Management*
- Meningkatkan kualitas analisis kebutuhan pelatihan dan konsultasi
- Meningkatkan kompetensi pengajar berkualitas internasional
- Meningkatkan kualitas hasil penelitian menarik minat internasional

Hasil Akhir

Citra¹ LPPI baru yang memiliki kompetensi internasional di bidang *microfinance* & syariah

GO ASEAN 2020

- *Branding* dengan meningkatkan kualitas seminar internasional khususnya *microfinance* dan syariah
- Memperluas mitra *strategic alliances*
- Mendapatkan pengakuan internasional / akreditasi internasional
- Meningkatkan kompetensi pengajar berkualitas internasional
- Meningkatkan kualitas hasil penelitian menarik minat internasional

Hasil Akhir

Di kawasan ASEAN dikenal sebagai lembaga pelatihan yang memiliki "*Distinctive Competency*" terutama di bidang *microfinance* dan syariah

Untuk tahun 2017 berdasarkan prognosa hingga Desember 2017 diketahui bahwa pendapatan yang berhasil diraih adalah sebesar Rp 150,04 miliar dengan biaya sebesar Rp 139,89 miliar dan menghasilkan surplus sebesar Rp 10,14 miliar.

Data - Data Penting 2017

Rp150,04

Pendapatan

Rp139,89

Biaya

Rp10,14

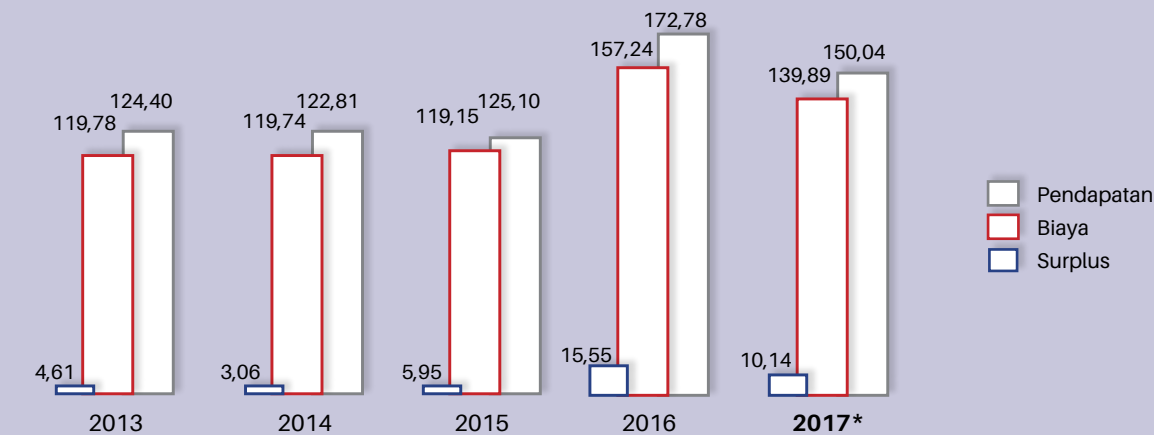
Surplus

*Angka dalam miliar rupiah (*unaudited*)

Peserta Pelatihan 2013-2017

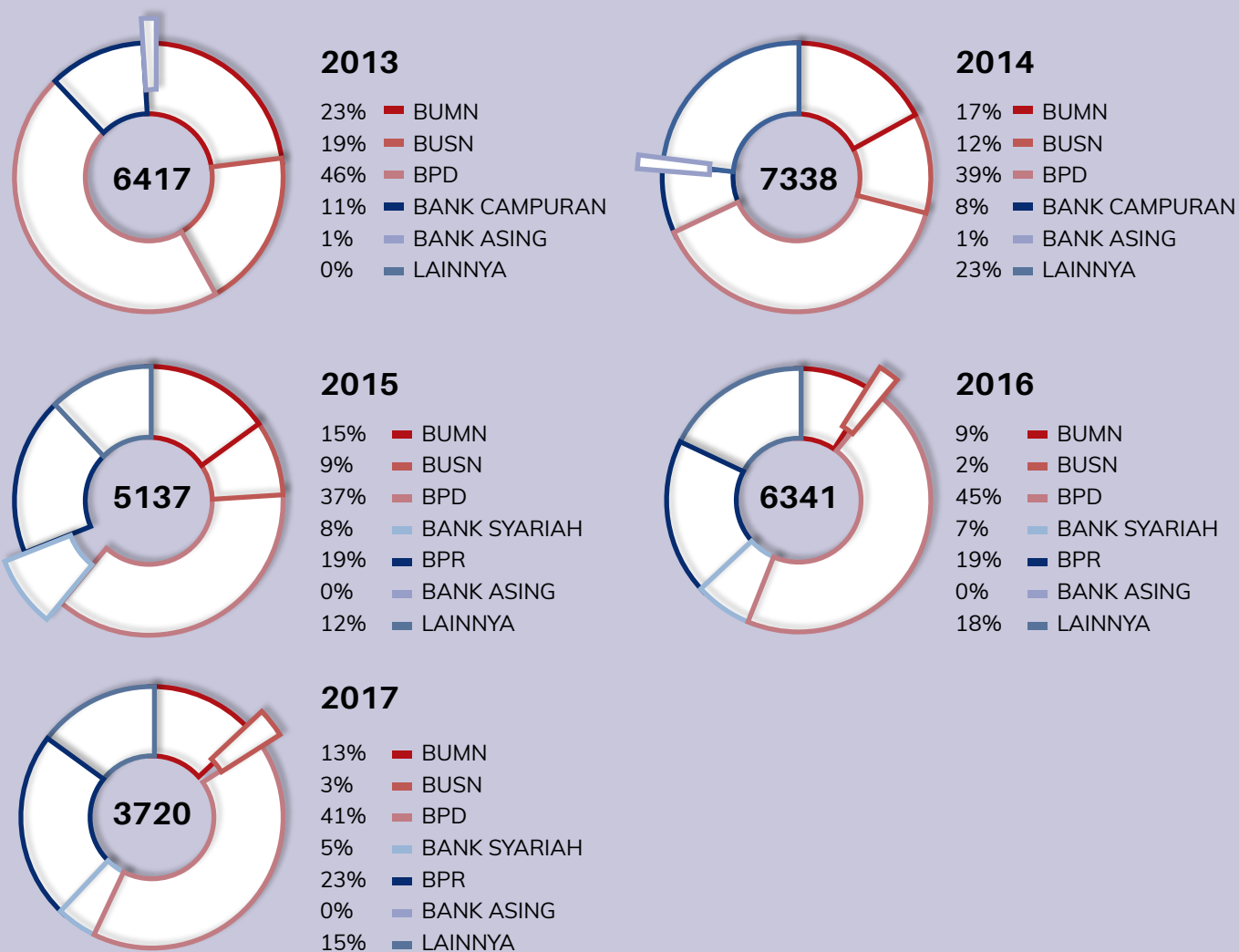
Gambar 1.1. Pendapatan, Biaya & Surplus

Jumlah angka dalam milyar rupiah



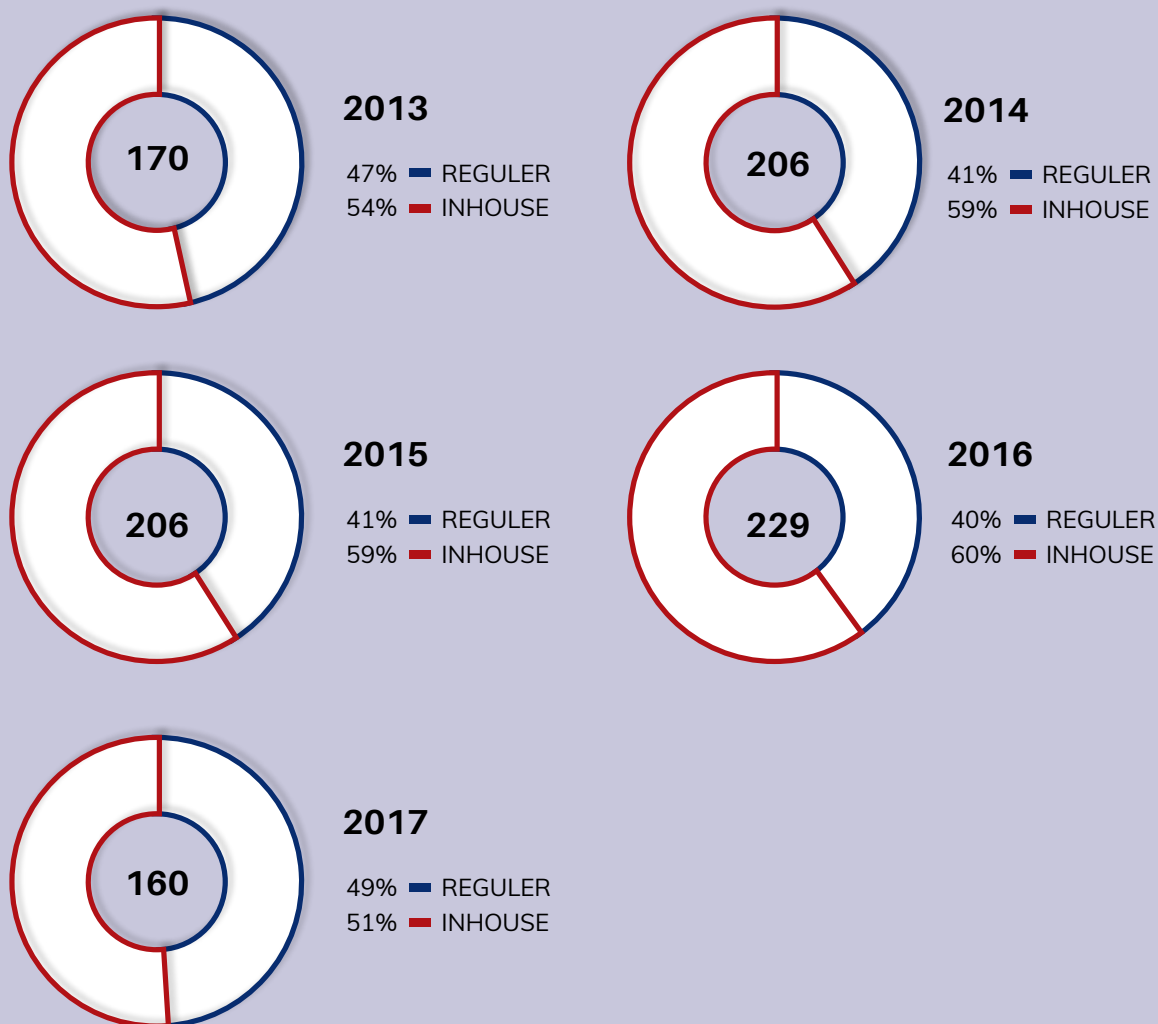
(sampai Oktober 2017)

Gambar 1.2. Persentase Peserta Diklat LPPI Berdasarkan Kelompok Bank

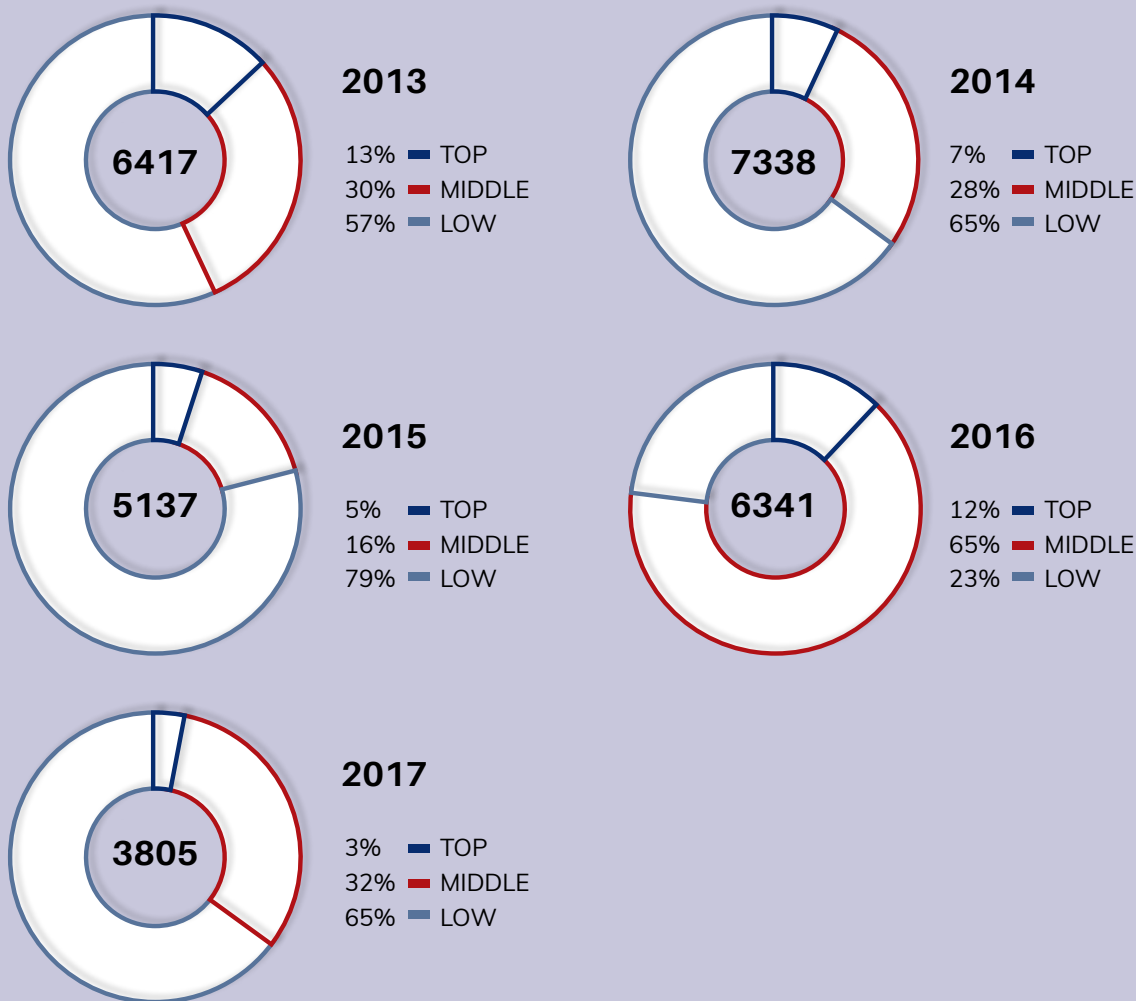




Gambar 1.3. Persentase Peserta Diklat LPPI



Gambar 1.4. Persentase Peserta Diklat LPPI berdasarkan Level



Tabel 1.2. Komposisi Peserta Diklat LPPI

KELOMPOK BANK	2013	2014	2015	2016	2017*
BUMN	783	567	783	567	485
BUSN	458	119	458	119	128
BPD	1908	2866	1908	2866	1532
BPR	964	1184	964	1184	849
Bank Asing	7	15	7	15	5
Bank Syariah	390	465	390	465	178
IKNB/ Lainnya	627	1125	627	1125	543
TOTAL	5137	6341	5137	6341	3720

(sampai Oktober 2017)

Sepanjang 2017, LPPI menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga global dan nasional. Berikut ini diantaranya :

Tabel 1.4. Kerja Sama LPPI dengan Lembaga Internasional dan Domestik*

No	Nama Lembaga	Bidang Kerjasama
1	RiskBussines	Event Loss Database System
2	International Finance Corporation (IFC)	Pengembangan Modul Sustainable Finance
3	Indonesia Infrastruktur Finance (IIF)	Pelatihan dan Penyusunan Modul Management Trainee (MT)
4	Bank UOB	Pelatihan dan Penyusunan Modul General Development Program (GDP)
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Seminar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
6	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Jasa Keuangan

*)Lihat halaman 93



Keuangan, Lembaga Pengembangan Perbankan (LPPI) telah menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam tiga tahun terakhir, LPPI terus berbenah dengan memperbaiki fasilitas pendukung dan membangun infrastruktur demi meningkatkan pelayanan dan kualitas pelatihan. Salah satunya adalah memperbaiki ruangan kantor. Peresmianya dilakukan oleh Direktur Utama LPPI Bapak Hartadi A Sarwono disaksikan oleh Sesebuah LPPI, Bapak Rachmat Saleh.





Di kalangan masyarakat umum, nama LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) sudah melekat dan selalu dikaitkan dengan kader-kader di industri perbankan. Sebagai lembaga pengembangan profesional di bidang perbankan, LPPI yang hadir sejak akhir 1958, memiliki hubungan dengan Bank Indonesia (BI), sejak cikal bakal nya. Oleh karena bank sentral menginisiasi pembentukan sekaligus memberi perhatian penuh kepada lembaga pendidikan dan pengembangan profesi pegawai bank ini, sejak awal pendiriannya.

Riwayat Singkat 1958-2017	23
Profil Dewan Direksi	27
Profil Staf Ahli Direksi	30
Profil Fakultas Kehormatan	32
Sejarah Penting	34
Ringkasan Kegiatan Utama	36

Riwayat Singkat 1958 - 2017



Gambar Taman Foto, salah satu sudut

Kilas Sejarah

Bank Indonesia yang lahir pada 1953, merasakan sejumlah kendala pengembangan sektor keuangan terutama perbankan, kala itu. Satu hal yang ditemukan adalah kurangnya tenaga-tenaga di bidang perbankan untuk mendukung perkembangan Bank Indonesia, serta meningkatkan jumlah dan kegiatan bank-bank pemerintah dan swasta. Maka dengan dukungan beberapa bank milik pemerintah dan swasta, didirikanlah sebuah lembaga pendidikan perbankan di bawah naungan Yayasan Akademi Bank, pada tahun 1958 cikal-bakal LPPI saat ini.

Yayasan Akademi Bank, yang langsung menempati gedung barunya di daerah Kemang, Jakarta Selatan ini, didirikan dengan akta notaris Rd. Mr. Soewandi No. 35 tanggal 18 Desember 1958. Anggaran dasarnya diumumkan dalam Berita Negara tertanggal 17 Februari 1959 nomor 14, yang kemudian diubah lagi pada 10 Oktober 1962 dengan nomor 37 di hadapan Professor Meester Egon Hakim, pengganti Raden Kadiman, Notaris yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam proses pendidikannya, Yayasan Akademi Bank ini mendapat dukungan dari Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia

(1946), Bapindo (Bank Industri Negara), BKTN (Bank Koperasi Tani & Nelayan) yang kemudian berubah menjadi BRI & Bank Ekspor Impor Indonesia. Bank Tabungan Pos, Badan Hukum Perbanas (Perhimpunan Bank-Bank Nasional), dan Yayasan Pendidikan Kader Bank. Alhasil proses pembiayaan Yayasan Akademi Bank didapat dari tunjangan/iuran para pendukung ini.

Setelah lima tahun berjalan, Yayasan Akademi Bank kemudian diubah status dan namanya menjadi PTIKP (Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan), yang peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1963. Anggaran dasarnya pun kembali diubah dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 25 Oktober 1963 nomor 86. Satus PTIKP pun ditetapkan berada di bawah Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri UBS/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 28/USB/65 tanggal 2 April 1965, yayasan PTIKP menjadi lembaga pendidikan di bawah Urusan Bank Sentral dengan nama Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan Dan Perbankan. Pembiayaan PTIKP ini didapat dari Bank Indonesia kecuali

Pemandangan gedung LPPi tampak dari jauh



biaya makan dan pengobatan mahasiswanya menjadi beban bank-bank yang mengirimkan karyawannya untuk dididik di lembaga ini.

Namun tidak begitu lama berjalan, nama PTIKP kembali mengalami perubahan lagi dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 121/UBS/65 tanggal 20 November 1965 dengan nama Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang, dengan status di bawah UBS.

Hanya saja, nama Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang ini tidak lama berlaku. Pada awal pemerintahan orde baru Surat Keputusan Gubernur Bank Negara Indonesia No. Kep.5/GBNI/66 tanggal 19 Agustus 1966, Surat Keputusan Menteri UBS No. 121/UBS/65 tanggal 20 November 1965, dan kembali Surat Keputusan Menteri UBS/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 28/UBS/65 tanggal 2 April 1965 dinyatakan berlaku lagi. Pada akhir tahun itu juga PTIKP resmi menjadi perguruan tinggi kedinasan di dalam lingkungan Kementerian urusan Bank Sentral/Bank Indonesia.

Berbagai perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah berlakunya UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan UU No. 13 Tahun

1968 tentang Bank Sentral, serta dimulainya Pelaksanaan Repelita pada April 1969, telah membawa pengaruh pada perjalanan PTIKP, sehingga sampai pada pemikiran untuk meninjau kembali status perguruan tinggi perbankan itu. Akhirnya, pada tahun 1970, PTIKP ditutup, dan sebagai gantinya didirikan sebuah lembaga baru, yang diberi nama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Mengingat kebutuhan YPPI makin meningkat, Bank Indonesia bermaksud meningkatkan kegiatan yayasan. Rachmat Saleh, sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu, menyatakan niat dan kesediaan Bank Indonesia untuk melanjutkan pengembangan usaha YPPI atas beban biaya Bank Indonesia. Maka, pada 29 Desember 1977, LPPi yang merupakan bentuk lain dari YPPI didirikan dengan status hukum yang baru. Bank Indonesia dapat sepenuhnya membiayai pengembangan usahanya.

Suatu perkembangan baru yang menyangkut perubahan peran LPPi terjadi pada tahun 1992, ketika perubahan peran LPPi itu sangat terkait dengan dikeluarkannya deklarasi pendirian Institut Bankir Indonesia (IBI) oleh tokoh-tokoh perbankan. Setelah deklarasi tersebut, IBI menjalankan fungsinya beberapa tahun.



Hal yang tak kalah menarik, pilihan pada pendiri LPPI saat meletakkan gedung baru Yayasan Akademi Bank pada 50 tahun yang lalu, di jantung area Kemang, sangatlah visioner mengingat wilayah ini telah menjelma menjadi kawasan strategis.

Namun, proses tersebut tidak berlangsung lama ketika pada tanggal 30 Oktober 2002 Dewan Nasional IBI memutuskan antara lain bahwa IBI akan menjadi organisasi Profesi Bankir di Indonesia dan melepaskan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan serta konsultasi. Alhasil, pada tanggal 29 Agustus 2003 IBI diserahkan kembali ke Pengurus Yayasan LPPI. Dan sepanjang masa peralihan, operasional kegiatan lembaga tetap berjalan sebagaimana biasa.

Tepatnya pada tanggal 31 Desember 2003, berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. nomor 117, didirikan LPPI era baru yang pada akhirnya menjalankan karyanya dalam menciptakan kader profesional di industri keuangan hingga kini.

Tahun 2017 menandakan karya LPPI telah memasuki tahun ke-59. Sebagai lembaga pendidikan di bidang keuangan, LPPI terus melakukan pengembangan fasilitas, modul, dan fakulti, guna mendukung kualitas dan kuantitas pendidikan yang dihasilkan. Hal ini untuk menjaga kepercayaan klien, serta aliansi dan jaringan yang telah dibangun LPPI, juga mempertahankan visi menjadi lembaga pengembangan perbankan dan jasa keuangan yang terpercaya dan terkemuka di tanah air,

serta mendapat pengakuan internasional.

Hal ini telah terbukti dengan masa bakti yang hampir memasuki 60 tahun, LPPI terus dipercaya oleh berbagai institusi seperti Bank BUMN, Bank Swasta, Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Lembaga Keuangan & Bank di Luar Negeri, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para kadernya melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (*knowledge, skill, attitude*).

Untuk itu, LPPI telah dan terus membangun jaringan di dalam negeri antara lain dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perbankan, Seluruh Bank BUMN, Lembaga Sertifikasi, dll. Sementara dari luar negeri LPPI membangun aliansi dengan *Australian Institute of Management, Institute Bank-Bank Malaysia, Belgian Banker's Academy, Asian Pacific Association of Banking Institute*, dan lain-lain.

Dengan misi membantu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan industri perbankan dan jasa keuangan yang sehat dan berkualitas, LPPI berkomitmen tampil sebagai *Center For Leadership And Ethics* dengan cara mendidik

LPPI berkomitmen tampil sebagai *Center For Leadership And Ethics* dengan cara mendidik dan membekali para bankir dari jenjang karier dasar hingga jenjang karir puncak dengan nilai-nilai etika bankir.

dan membekali para bankir dari jenjang karier dasar hingga jenjang karir puncak dengan nilai-nilai etika bankir.

Untuk menunjang proses pendidikan tersebut, LPPI telah memiliki fasilitas yang sangat memadai. Sebut saja fasilitas ruang kelas yang mencapai 30 ruangan dengan kapasitas 30-40 peserta, fasilitas Wisma dengan kapasitas 300 peserta, *Cafeteria* dengan kapasitas 600 peserta, Perpustakaan dengan 10000 buku, juga infrastruktur pendukung lainnya seperti *Fitness Center*, *Free Wi Fi*, dan lain-lain.

Dari sisi manajemen dan tenaga pengajar, LPPI memiliki jajaran persona-persona berpengalaman di Industri Perbankan dan Jasa Keuangan, jajaran divisi yang merupakan praktisi industri, serta *Honorable Faculty* dan 450 Tenaga Pengajar dari Praktisi Eksternal.

Ada pun materi pendidikan yang diberikan di LPPI terus disesuaikan dengan perkembangan industri terkini, mengacu pada standar kompetensi baik internasional maupun

nasional seperti SKKNI. Materi pendidikan juga dilengkapi dengan *refreshing courses* yang relevan dengan kebutuhan industri termasuk untuk uji sertifikasi, seminar dan *workshop* yang *up to date*, serta modul yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien.

Hal yang tak kalah menarik, pilihan pada pendiri LPPI saat meletakkan gedung baru Yayasan Akademi Bank pada 50 tahun yang lalu, di jantung area Kemang, sangatlah *visioner* mengingat wilayah ini telah menjelma menjadi kawasan strategis. LPPI terletak di jalan utama Kemang Raya yang dikelilingi oleh pusat hiburan, kuliner, dan perbelanjaan, seperti Lippo Mall Kemang, butik, kafe, restoran, dan supermarket. Pusat pendidikan kader bank dan jasa keuangan ini pun tidak jauh dari pusat kawasan bisnis perbankan. Sebut saja jarak tempuh yang hanya memakan waktu seperempat jam ke kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), kawasan perkantoran Kuningan dan TB Smlatupang.

Profil Dewan Direksi



Hartadi A. Sarwono, MA., Ph.D **Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta, 10 Agustus 1952. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik di bidang Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1979 dan gelar *Master of Arts* (MA) di bidang *Macroeconomics* di University of Oregon, Eugene-Oregon, Amerika Serikat, pada tahun 1985, serta meraih gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D) di bidang *Monetary Theory and Policy* pada universitas yang sama pada tahun 1989.

Ia diangkat menjadi Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada 26 Agustus 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Kebijakan Moneter, Internasional, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Statistik, Pengelolaan Devisa dan Kantor Perwakilan Luar Negeri (2008-2013) dan Deputy Gubernur BI Bidang Kebijakan Moneter, Statistik dan Hubungan Internasional (2003-2008). Dan menjadi Direktur/Kepala Perwakilan Bank Indonesia-Tokyo (Februari-Juni 2003) serta Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI (2000-2003). Pada tahun 1997-2000, ia menjabat sebagai Deputy Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI dan Kepala Bagian Analisis dan Perencanaan Kebijakan (1996-1997).

Pada 12 Januari 2016 diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia. Setelah itu, pada 21 Agustus 2017 ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Bank Mandiri, Tbk.

Profil Dewan Direksi



Wimboh Santoso, Ph.D
Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada 15 Maret 1957, di Boyolali, Jawa Tengah. Pada tahun 1983 lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kemudian melanjutkan program doktoral pada 1995 dan berhasil meraih gelar PhD di bidang *Financial Economics* di Loughborough University, Inggris pada 1999.

Selama bertugas di Bank Indonesia, ia menjadi salah satu sosok yang terlibat dalam reformasi perbankan Indonesia pascakrisis 1997/1998 di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan dari tahun 2000-2012 dengan posisi terakhir Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Pada tahun 2012 dipercaya menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York. Baru 10 bulan menempati pos di New York, didaulat menjadi Direktur Eksekutif IMF yang berkantor di Washington DC untuk ASEAN plus Fiji, Tonga, dan Nepal sampai April 2015.

Kemudian pada Desember 2015, ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri menggantikan Darmin Nasution yang diangkat menjadi Menko Perekonomian. Pada tahun yang sama ia menjadi salah satu Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Pada Juli 2017 terpilih menjadi Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2017 - 2022.



Dr. Krisna Wijaya, MM
Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta, 22 Juli 1955. Meraih gelar sarjana pertanian dari IPB pada tahun 1980 dan gelar Master di bidang Ilmu Manajemen dari Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1990 serta meraih gelar Doktor di bidang Program Studi Antar Bidang, UGM pada 2009 dengan predikat *Cum Laude*.

Bergabung di LPPI sejak Januari 2016. Pengalamannya di bidang perbankan sudah lebih dari 34 tahun, dengan bidang utamanya *retail* dan *marketing banking*. Memulai profesi bankir di PT Bank BRI, Tbk sejak tahun 1980. Di BRI, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Operasional BRI (2000-2003) dan Direktur Bisnis Mikro dan Ritel BRI (2003-2005). Dari tahun 2005-2007 ditugaskan Pemerintah sebagai Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (2008-2010), Komisaris Independen PT Bank Mandiri, Tbk (2010-2015). Kemudian, pernah menjadi Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Republik Indonesia (2003-2004), Anggota Tim Pengarah Forum Stabilitas Sistem Keuangan, Departemen Keuangan RI (2007).

Beliau juga tercatat sebagai Komisaris Utama BNI Life sejak 2015, serta aktif sebagai Dosen untuk program magister pada beberapa perguruan tinggi.



Suwartini, MBA
Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Prabumulih pada tahun 1953. Menyelesaikan *Master of Business Administration* (MBA) di Century University, New Mexico, Amerika Serikat. Pendidikan lain yang telah ditempuh yakni *Risk Management Certification Group* III, Bank Indonesia and IRPA Amsterdam dan *Risk Management Refresher Course For Senior Management of Indonesian Banks Organized by BSMR and Standard Chartered Bank, London*. Selain itu sebagai Asesor Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV dan V, Asesor *General Banking* Tingkat III, dan Asesor *Leadership*.

Memulai karier tahun 1974-1978 sebagai *Asisten Auditor* dan *Admin Officer* di beberapa Oil Company, *Senior Program/Project Control Officer* di *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), hingga memutuskan berkarier di sektor perbankan.

Sebelum bergabung dengan LPPI pada 2013, ia menjabat Direktur Risiko, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia PT Bank Mega, Tbk (2000 - 2012) dan sebagai Komisaris Independen Commonwealth Bank Indonesia (2012 - sekarang).

Selama lebih dari 20 tahun menggeluti dan menguasai berbagai bidang perbankan khususnya bidang kepatuhan, jasa perusahaan, manajemen SDM, manajemen risiko dan APU-PPT, termasuk lebih dari 12 tahun sebagai Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko dan SDM.



Rizal Anwar Djaafara, MA
Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Gorontalo 25 Februari 1958. Meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1984 dan gelar *Master of Art* (MA) dari William College, Massachusetts, Amerika Serikat di bidang *Development Economics*.

Memulai karier di Bank Indonesia sejak 1985. Mendapat beberapa pos penugasan, antara lain menjadi Direktur Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) pada tahun 1997-2000 serta Kepala Biro Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI. Sebelum bergabung di LPPI pada 2016, menjabat sebagai Direktur Direktorat Internasional Bank Indonesia (BI).

Profil Staf Ahli Direksi



Heru Kristiyana, SH, MM

Bidang : Banking

Laki-laki kelahiran Salatiga, 5 September 1956 ini merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1981. Pada tahun 2000, meneruskan pendidikan S2-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI. Beliau pernah mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 di Bank Indonesia pada 2011 lalu. Berkat kepiawaiannya menjalankan amanat tersebut, ia pun dipercaya menempati posisi Deputy Komisioner Pengawas Perbankan 4 Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan 2013-2016. Beliau dikenal juga sebagai salah satu inisiator dan *think-tank* utama dalam proses pengembangan metodologi pengawasan berbasis risiko sejak awal 2000-an. Dia menaruh perhatian di bidang peningkatan kompetensi pengawas dan tak segan turun langsung mendidik pengawas agar berkompetensi dalam penerapan risk based supervision. Pada Juli 2017, Heru terpilih menjadi salah satu komisioner di Otoritas Jasa Keuangan.



Harisman Sidi, MA

Bidang : Keuangan Syariah

Berpengalaman di bidang syariah dan lebih dari 20 tahun bekerja di Bank Sentral dengan berbagai pendidikan dan keterampilan di bidang moneter, perbankan umum dan perbankan syariah. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Center for Development Economics Williams College, USA ini sebelum bergabung dengan LPPi adalah Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Staf Ahli Dewan Gubernur BI. Sebagai Komisaris Bank BNI Syariah periode 2013 -2015.



Mulya Effendi Siregar, Ph.D

Bidang : Perbankan dan Manajemen Risiko

Meraih gelar *Doctor of Philosophy Consumer Economics* dari Ohio State University, Amerika Serikat. Berpengalaman selama kurang lebih 30 tahun di Bank Indonesia di bidang riset dan studi perbankan syariah. Sebelum bergabung dengan LPPi menjabat sebagai Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Mandiri.



Siddha Karya, SH, LLM

Bidang : Legal

Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Washington College of Law, American University, Washington DC, USA, dengan gelar *Master of Law in International Legal Studies* (LLM). Berkarir di Bank Indonesia selama 31 tahun, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Eksekutif di Direktorat Hukum. Selain berkarir di Bank Indonesia, pernah ditugaskan pada Duta Besar RI untuk Perundingan *Uruguay Round*, Geneva, Swiss (1992-1993), anggota DelRI pada *Working Group on ASEAN Financial Services Liberalization*, ASEAN Secretariat (1996-1999), dan *Working Group on E-Commerce*, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), New York, USA (2014).



Deche Helmy Hadian, S.E.

Bidang : Organisasi dan SDM

Alumni dari Fakultas Ekonomi, bidang Manajemen, Universitas Padjajaran, Bandung. Berpengalaman di bidang pengawasan perbankan, sumber daya manusia, dan pencegahan pencucian uang dalam transaksi keuangan. Berkarir di Bank Indonesia selama 30 tahun, dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Gubernur Bank Indonesia. Penugasan lainnya adalah sebagai Deputy Bidang Pencegahan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .



Chandra Murniadi, SH.,MCL

Bidang : Hukum

Alumni dari George Washington University, Washington DC, USA, dengan meraih gelar *Master of Comparative Law (MCL)*. Berpengalaman di bidang hukum perbankan, perbankan internasional, pengawasan bank, dan sistem pembayaran. Berkarir di Bank Indonesia selama kurang lebih 32 tahun antara lain di Bagian Pemeriksaan Bank, Biro Hukum, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Direktorat Pengelolaan Moneter, Unit Khusus Penyelesaian Aset, dan Departemen Riset Kebanksentralan. Selain itu juga berpengalaman di dalam penugasan khusus sebagai anggota tim yang mengkaji pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), anggota tim RUU Bank Indonesia, anggota tim Divestasi Indover Bank, serta penugasan di *law firm* White and Case, New York, USA.



Ir. Zainal Fanani

Bidang : Perbankan Syariah & Manajemen Risiko

Alumni dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Sipil Bidang Studi Transportasi. Berpengalaman di Industri Perbankan Syariah. Mengawali karir di Perbankan dengan mengikuti Pendidikan Eksekutif Bank di Bank Susila Bakti, dan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan di Bank Syariah Mandiri. Memiliki keahlian di bidang perencanaan, keuangan, kepatuhan dan manajemen risiko di perbankan syariah. Saat ini beliau menjabat sebagai konsultan di *Islamic Research and Training Institute* Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan juga menjadi anggota Pengurus Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan.



Ir. Ahmad Fajar, MM

Bidang : *Treasury, Risk Management* dan *Project Financing Expertise*

Alumni dari Magister Manajemen Keuangan Universitas Padjajaran. Berpengalaman di Industri Perbankan Nasional dengan keahlian di bidang *treasury* dan memegang beberapa pendidikan sertifikasi seperti *Risk Management Competency Level V*. Sebelum bergabung dengan LPPI menjabat sebagai President Director PT Bank Mutiara Tbk. Saat ini beliau juga dipercaya sebagai salah satu Komisaris di J Trust Bank.



Martin Panggabean, Ph.D

Bidang : Riset

Alumni Ph.D dari University of Illinois at Urbana-Champaign dalam studi Regional Economics. Berpengalaman dalam riset dan pengembangan di industri keuangan terutama perbankan. selama 9 tahun sejak 1999 menjadi Kepala Riset Bank Mandiri dan dilanjutkan dengan jabatan Head of Risk Model Validation di bank yang sama selama dua tahun hingga tahun 2010. Selanjutnya melanjutkan karier di Bank Mega sebagai Kepala dari Divisi Manajemen Risiko dari 2010 hingga 2016. Sejak 2016 juga menjadi pengajar di Intitut Teknologi Bandung dan Universitas Katolik Atmajaya.

Profil Fakulti Kehormatan



Drs. Rachmat Saleh

Dikenal sebagai *Founding Fathers* dan pendiri Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi). Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengawali kariernya di Bank Indonesia (BI) sejak 1956. Sempat ditempatkan di Reserve Bank of India, Bombay, kemudian ditugaskan sebagai wakil sementara pada Perwakilan BI di AS. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Pembantu pada Perwakilan RI di Amsterdam, Belanda.

Pada tahun 1964 diangkat sebagai Direktur Bank Indonesia untuk masa dua jabatan. Kemudian pada tahun 1973 diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia yang juga dijabatnya dalam dua masa jabatan sampai dengan tahun 1983. Sebagai Gubernur Bank Indonesia, dan merangkap sebagai *Governor* World Bank, dan *Alternate Governor* di IMF, Asian Development Bank dan Islamic Development Bank. Terakhir menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan V (1983-1988).



Prof. Dr. Adrianus Mooy

Menyelesaikan Sarjana Muda Ekonomi di UGM serta *Master of Science* di bidang uang dan bank serta PhD bidang ekonomi pembangunan/ekonometri pada University of Wisconsin, Amerika Serikat tahun 1966 dan memperoleh gelar Profesor untuk bidang ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1987.

Menjabat sebagai Deputy Ketua Bappenas (1973-1988), Gubernur Bank Indonesia (1988-1993), Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa (1993-1995), dan berbagai jabatan penting lainnya antara lain *Senior Advisor* untuk United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR). Sejak 2007 beliau menjabat sebagai *Senior Advisor/Mentor* pada Universitas Pelita Harapan Karawaci, Dekan UPH Business School (2010) dan Rektor UPH Surabaya.



Prof. Dr. H. Djokosantoso Moeljono, CBA

Pendidikan formalnya adalah doktorandus ekonomi UGM, lulus tahun 1966 dan tahun 2002 lulus program Doktor dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi dari Universitas yang sama, serta memperoleh gelar Profesor bidang ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008.

Alumnus Massachussets Institute of Technology, Sloan School of Management, Program for Senior Executive, Cambridge, USA tahun 1983 ini melengkapi keterampilannya dengan beberapa pendidikan perbankan di dalam dan luar negeri, antara lain pendidikan *Organizational Behavior I & II dari Morgan Guarantee Ltd*, Princeton, USA tahun 1987 dan tahun 1988.

Karier kepemimpinannya ditempuh lebih kurang 34 tahun, dimulai dari dua lembaga pemerintah hingga memimpin puncak dua Bank Pemerintah, terakhir sebagai Direktur Utama Bank BRI selama kurang lebih tujuh tahun. Pekerjaan lain yang pernah dan masih dijalannya adalah Komisaris Utama/Komisaris di beberapa perusahaan swasta dan juga sebagai Dewan Pembina dan Dosen tetap MM-UGM dan SESPIBANK LPPI. Beberapa buku telah ditulisnya, antara lain *Beyond Leadership*, Bank Korporat & Keunggulan Korporasi, Reinvensi BUMN, 8 Langkah Strategis Mendaki Karier Puncak, *The Climbers*, Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi.



Dr. Darmin Nasution

Menempuh studi dan lulus sebagai sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1970. Lalu meneruskan studi Pascasarjana dan Doktoratnya di Sorbonne University, Paris, Perancis.

Memulai karier sebagai dosen di FEUI dan memimpin lembaga LPEM-FEUI. Sementara kariernya di luar kampus, beliau banyak terlibat di bidang kebijakan fiskal dan moneter. Pernah tiga kali menjadi asisten menteri, yaitu Asisten Menko Pengawasan Pembangunan dan PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara), Asisten Menteri Koordinator (Menko) Produksi dan Distribusi, serta Asisten Menteri Koordinator (Menko) Industri dan Perdagangan. Kemudian menjadi Kepala Bapepam, Direktur Jendral Pajak (2006-2009), Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (2009-2010), puncaknya Gubernur Bank Indonesia (2010-2013), meneruskan masa jabatan Gubernur sebelumnya, yaitu Boediono, yang menjadi Wakil Presiden. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menko Perekonomian. Beliau tercatat sebagai pengajar di program SESPIBANK LPPI.

Sejarah Penting



2-April
Yayasan PTIKP diubah menjadi lembaga pendidikan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral (UBS) dengan nama Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri UBS/ Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 28/USB/65 tanggal 2 April 1965.

5-Juli
Yayasan Akademi Bank diubah status dan namanya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP), yang peresmian dilakukan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1963.

Desember 1965
PTIKP resmi menjadi perguruan tinggi kedinasan di dalam lingkungan Kementerian Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia.

1958

1963

1965

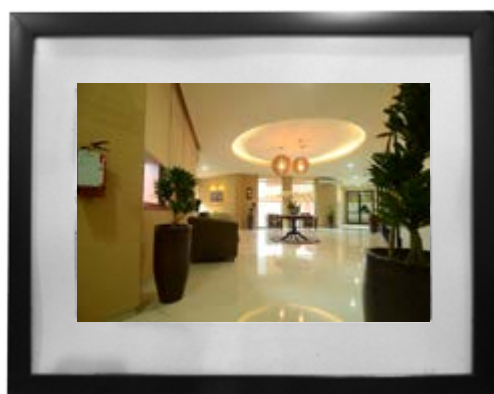
1970

18-Desember
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi) didirikan dengan nama Yayasan Akademi Bank

20-November
Nama PTIKP kembali diubah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral (UBS) No. Kep. 121/UBS/65 tanggal 20 November 1965 dengan nama Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang, dengan status di bawah Kementerian UBS.

Desember,
PTIKP ditutup, dan sebagai gantinya didirikan sebuah lembaga baru, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).





Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, yang merupakan bentuk lain dari YPPI didirikan dengan status hukum yang baru. Bank Indonesia sepenuhnya membiayai pengembangan usahanya.

1977

LPPI mengalami perubahan peran, karena dikeluarkannya deklarasi pendirian Institut Bankir Indonesia (IBI) oleh tokoh-tokoh perbankan. Setelah deklarasi tersebut, IBI menjalankan fungsinya menggantikan LPPI.

1992

2002

2003

2017

2017
Pencapaian penting peran LPPI di industri jasa keuangan yang telah memasuki usia ke-59. Sebagai lembaga pendidikan di bidang keuangan, LPPI terus melakukan pengembangan fasilitas, modul, dan fakulti, guna mendukung kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dihasilkan.



2002
Dewan Nasional IBI memutuskan IBI akan menjadi organisasi Profesi Bankir di Indonesia dan melepaskan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan serta konsultasi.

Pada tanggal 29 Agustus 2003 IBI diserahkan kembali ke Pengurus Yayasan LPPI. Dan sepanjang masa peralihan, operasional kegiatan lembaga tetap berjalan sebagaimana biasa. Tepatnya pada tanggal 31 Desember 2003, berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. nomor 117, LPPI era baru pun berdiri. LPPI kemudian semakin memperkuat perannya dalam menciptakan sumber daya profesional di industri keuangan hingga kini.

Ringkasan Kegiatan Utama

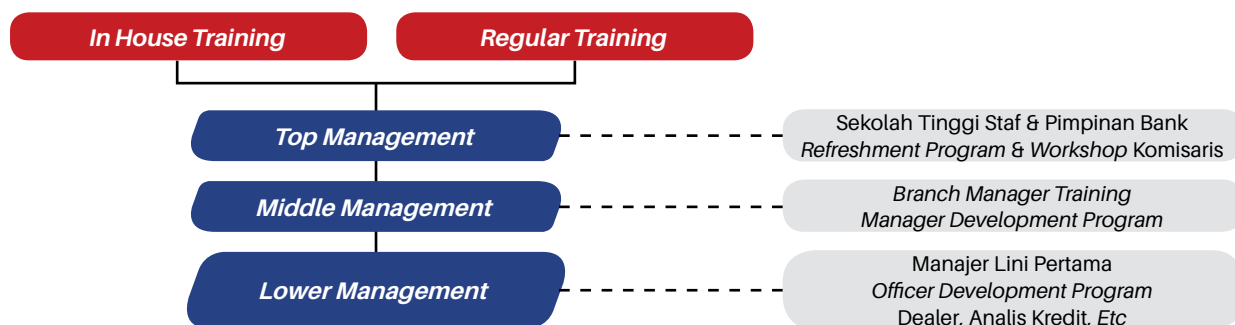
01 Training 02 Consulting 03 Research

Top Management
Middle Management
Low Management

Recruitment
Assessment
Consultation

Pengembangan Materi & Kurikulum
Pusat Kajian Manajemen Risiko dan Keuangan Mikro
Majalah Stabilitas Perbankan

01 Training



Seminar dan Refreshment

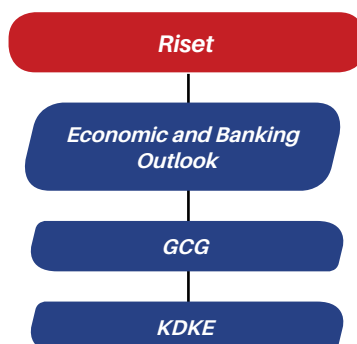


02 Konsultasi dan Assessment



*) Mulai dari ODP sampai Direksi dan Komisaris

03 Riset



Dalam tiga tahun terakhir, LPPI terus berbenah melengkapi fasilitas pendukung dan membangun infrastruktur demi meningkatkan pelayanan dan kualitas pelatihan.



Tampak pelanggan LPPI tengah berkunjung ke Dealing Room

Budaya kerja KIPRAH merupakan budaya kerja yang ditanamkan di LPPI sejak tahun 2007. KIPRAH dalam hal ini mengandung arti bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai LPPI berada dalam sebuah siklus kerja yang berkesinambungan

KIPRAH dan Kebijakan Mutu GESIT	39
Tata Kelola Perusahaan	40
Re- Sertifikasi ISO 9001 : 2015	43
Tugas & Fungsi	44

KIPRAH & Kebijakan Mutu GESIT

K

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan bidang tugas dan standar kualitas yang ditetapkan.

I

Integritas merupakan perilaku yang patuh dan konsisten terhadap peraturan organisasi, memegang teguh nilai kejujuran dan moral, serta mengutamakan kepentingan

P

Pelayanan merupakan segala kegiatan dan sikap yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Pelayanan dalam hal ini mencakup sikap dan perbuatan yang selalu membina hubungan baik dengan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan serta berusaha melayani pelanggan melebihi harapan pelanggan dengan tulus.

R

Responsif merupakan sikap atau perilaku yang cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, proaktif, atau 'penjemput bola', dan upaya secara konsisten ingin mengetahui dan memberikan solusi terhadap kebutuhan pelanggan.

A

Akuntabel merupakan sikap yang berani mempertanggungjawabkan atas semua tindakan, perbuatan, perkataan dan semua konsekuensinya dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

H

Harmonis merupakan sikap yang selalu memelihara rasa kekeluargaan, kesetaraan, kekompakan dan keselarasan dalam pelaksanaan tugas. Menghargai perbedaan pendapat dan menghormati keputusan bersama. Menyadari bahwa peran setiap individu penting dalam pencapaian tujuan bersama.

Budaya kerja KIPRAH merupakan budaya kerja yang ditanamkan di LPPI sejak tahun 2007. KIPRAH dalam hal ini mengandung arti bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai LPPI berada dalam sebuah siklus kerja yang berkesinambungan yang meliputi beberapa hal.

1. Perilaku pegawai. Perilaku pegawai LPPI harus mempunyai integritas tinggi dan mampu menjalin hubungan yang harmonis baik antara sesama pegawai maupun klien.
2. Modal kerja. Pegawai LPPI harus kompeten dan terus meningkatkan kompetensi dirinya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan klien. Pegawai juga harus responsif, tanggap terhadap kebutuhan klien.

3. Pelaksanaan kerja. Pegawai LPPI harus dapat memberikan pelayanan prima dan akuntabel -bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dikerjakan.

Budaya kerja KIPRAH ini adalah inovasi dan upaya yang terus dilakukan oleh LPPI sesuai dengan visi dan tujuan jangka panjang LPPI, yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pengembangan perbankan yang modern, terpercaya, terkemuka dan diakui secara internasional.

Untuk menjadi lembaga yang modern, SDM adalah modal utama dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan *output* yang berkualitas. Bentuk peningkatan SDM dalam

budaya kerja KIPRAH ini, LPPI melakukan 4 hal, yaitu Rekrutmen, Pengembangan karier, Renumerasi/penghasilan, dan Pengembangan/ meningkatkan kompetensi.

Adapun dari segi pelayanan, LPPI berusaha memenuhi tuntutan kepuasan klien melalui penyediaan kampus, asrama dan fasilitas lain yang bersih, rapi, aman dan nyaman serta tata boga yang terjamin kebersihan, kesehatan dan rasa yang memuaskan klien.

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan klien,

LPPI menghasilkan produk berupa *training*, konsultasi dan riset yang berdaya guna dan bisa diaplikasikan memenuhi kebutuhan klien.

Kebijakan Mutu "GESIT"

LPPI memberikan jasa pendidikan dan pelatihan perbankan dalam dan luar negeri (ASEAN) yang Global, Efisien, Sistematis, Inovatif, dan Tepat (GESIT) kepada *Customer* dan calon *Customer*.



Tata Kelola

Peran LPPI sebagai sebuah institusi yang sudah berpengalaman selama 59 tahun dalam mengembangkan sumber daya insani di industri perbankan dan jasa keuangan, akan selalu dituntut untuk semakin tumbuh dan besar. Dengan keterbukaan pasar melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia (SDM) berkualitas pun semakin meningkat.

Industri tidak lagi hanya menuntut SDM yang terampil dalam menjalankan setiap tugasnya, cekatan dalam merespon perubahan, namun juga harus memiliki integritas yang kokoh. Untuk menjawab tantangan itu semua, pada 24 Mei 2014 bertepatan dengan Wisuda Sespibank angkatan 59 dan 60, disaksikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, Gubernur Bank Indonesia selaku Ketua Dewan Kurator LPPI, Agus D. W. Martowardojo, Direktur Utama LPPI, Hartadi A. Sarwono secara resmi mengukuhkan LPPI sebagai *Center for Leadership and Ethics*.

Penguatan itu diharapkan semakin memperkuat *positioning* LPPI sebagai organisasi yang sangat *concern* dalam membangun SDM perbankan dan jasa keuangan. Tidak hanya memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tapi juga sekaligus mempunyai pondasi nilai yang kokoh. Dengan menyelaraskan keduanya diharapkan akan lahir praktisi jasa keuangan yang handal dan berintegritas.

Untuk mencapai itu semua, LPPI sangat menyadari organisasi harus terus menerus melakukan inovasi dan menjadi *trend setter* dalam penerapan tata kelola (*governance*) yang baik. Karena, penerapan tata kelola secara konsisten akan memperkuat nilai organisasi dan semakin meningkatkan posisi daya tawar. Selain itu, implementasi tata kelola juga dapat mempertahankan keunggulan sekaligus mendorong perkembangan usaha secara sehat dan berkesinambungan.

Tata kelola (*governance*) bukan hanya

membentuk sistem *check and balances* yang efektif dan mengeliminir *mismanagement*. Lebih dari itu semua, tata kelola yang baik juga akan menjamin kokohnya organisasi (Wilson Arafat, 2008). Penerapan tata kelola yang baik merupakan pondasi bagi terbentuknya sistem, struktur, dan kultur organisasi yang adaptif terhadap setiap perubahan yang ada, serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.

Ada 5 (prinsip) Tata Kelola yang dijadikan pedoman oleh LPPI yang dirangkai dalam akronim TARIF.



1. *Transparency*

Dalam mewujudkan prinsip ini, organisasi akan memaksimalkan ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat kepada segenap *stakeholders* dengan menggunakan berbagai perangkat media informasi seperti website. Informasi yang disediakan antara lain ; program pelatihan dan pengembangan, *workshop*, seminar, dan kegiatan pendukung lainnya Keterbukaan dilakukan agar para *stakeholders* mengetahui setiap aktifitas yang sedang dan akan dilakukan organisasi. Untuk internal, sistem aplikasi yang terintegrasi menjadi keharusan yang harus segera dilaksanakan.

2. *Accountability*

Prinsip ini menuntut kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara dewan direksi, para pimpinan satuan kerja (satker), dan konsultan. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Sementara seluruh pimpinan divisi bertugas mengorganisasi sekaligus memonitor seluruh komponen dalam satuannya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Untuk konsultan, setiap konsultan harus mampu dan selalu menyampaikan tren yang tengah berkembang di industri keuangan dan perbankan kemudian menganalisisnya dan merekomendasikan dalam bentuk usulan-usulan konkrit.

3. *Responsibility*

Bentuk pertanggung jawaban organisasi adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya terkait dengan pajak, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan

bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan memperhatikan ini dalam kegiatan operasionalnya, berarti LPPI turut peduli terhadap lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

4. *Independency*

Prinsip ini mensyaratkan organisasi harus dikelola secara profesional, *right man on the right place*. Kepentingan yang berlaku di dalam organisasi hanya satu, yaitu kepentingan organisasi, tidak ada yang lain. Untuk itu, organisasi berkewajiban menutup rapat setiap celah yang berpotensi akan menciptakan benturan kepentingan, tekanan atau intervensi dari pihak manapun ke dalam berbagai peraturan.

5. *Fairness*

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* berdasarkan peraturan perundangan. Karena *fairness* juga dapat menjadi faktor pendorong untuk memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan. Dengan menjalankan prinsip ini akan mencegah terjadinya praktek-praktek tercela dan melanggar aturan.

Penutup

Nilai tata kelola hanya membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua organisasi dalam penerapannya. Seluruh jenjang organisasi harus siap dan mampu menjalankannya dengan perencanaan, arah, dan ukuran yang jelas (kuantitatif dan kualitatif), sehingga dampak dari penerapan nilai-nilai tersebut dapat dirasakan oleh seluruh *shareholder* maupun *stakeholder* yang ada.

Re-Sertifikasi ISO 9001: 2015



Sejak tahun 2011, proses bisnis utama di LPPI dalam menyediakan jasa “Pendidikan dan Latihan (Diklat)”, dan “Konsultasi & Asesmen” beserta proses bisnis penunjang lainnya telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008, yaitu sertifikasi yang menjamin bahwa LPPI mematuhi persyaratan standar mutu yang tercantum dalam klausul-klausul ISO 9001:2008 dalam melakukan kegiatannya dan patuh pada SOP yang berlaku, sehingga jasa Diklat dan Konsultasi/Asesmen yang diberikan LPPI dapat memuaskan para klien.

Sejak tahun 2011 tersebut Sertifikat ISO yang diperoleh LPPI telah mengalami perpanjangan (re-sertifikasi) sebanyak 2 (dua) kali. Pada re-sertifikasi yang terakhir di bulan November 2017, sekaligus mengubah versi dari ISO 9001:2008 (versi tahun 2008) menjadi ISO 9001:2015 (versi terakhir tahun 2015) yang memasukkan unsur manajemen risiko, sebagaimana disyaratkan oleh ISO 9001:2015

Berkat kerjasama yang baik antara Direksi bersama seluruh satuan kerja serta adanya komitmen yang kuat untuk menyediakan jasa diklat dan konsultasi yang berkualitas, PT. SAI Global Indonesia – lembaga sertifikasi ISO yang berkantor pusat di Australia – yang

melakukan re-sertifikasi ISO 9001:2015 LPPI, merekomendasikan bahwa LPPI tetap memenuhi syarat untuk memegang Sertifikat ISO yang dalam hal ini untuk versi terbaru yaitu ISO 9001:2015. Saat ini Sertifikat ISO 9001:2015 dalam proses penerbitan oleh PT. SAI Global Indonesia yang memerlukan waktu hingga akhir Desember 2017. Pada Januari 2018, LPPI sudah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015.

Berdasarkan hasil evaluasi para peserta diklat dapat diketahui bahwa sekitar 95% peserta diklat menilai baik dan sangat baik terhadap penyelenggaraan diklat dan para pengajar. Adapun *feedback* para peserta diklat merupakan masukan yang sangat bermanfaat dalam menyempurnakan penyelenggaraan diklat dan kualitas mengajar para pengajar.

Dengan pertimbangan bahwa Sertifikat ISO ini menjadi salah satu faktor keunggulan kompetitif di kalangan lembaga diklat, maka Direksi beserta seluruh pejabat dan pegawai berkomitmen untuk terus mempertahankan pemilikan Sertifikat ISO, dengan berusaha selalu mematuhi SOP dalam melakukan seluruh proses bisnis.

Tugas dan Fungsi



Suasana ruang kerja

LPPI merupakan satu-satunya lembaga pengembangan perbankan di Indonesia yang mempunyai visi dan misi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perbankan dan jasa keuangan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk menjalankan misinya itu, LPPI mempunyai beberapa satuan kerja seperti berikut ini:

1. Divisi Riset dan Pengembangan Program

Divisi Riset dan Pengembangan Program (DRP) bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan riset terutama yang berkaitan dengan pengembangan program-program yang dapat diselenggarakan lembaga maupun untuk memperoleh pendapatan yang mencakup diferensiasi produk berupa tetapi tidak terbatas pada wawasan dan *cross fertilization*.

Secara ringkas, tugas utama DRP adalah menyelenggarakan riset dan mengembangkan program. Riset dilakukan terutama yang berkaitan dengan pengembangan program pelatihan yang dijalankan di LPPI. Untuk

itu DRP melakukan kegiatan *Training Need Analysis* (TNA), mendesain program, *updating* bahan ajar, mengawasi pelaksanaan program dan mengendalikan mutunya. Terkait dengan tugas-tugasnya ini, DRP melakukan koordinasi dengan kelompok peneliti, konsultan dan pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan program. DRP juga melakukan koordinasi dengan Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis untuk melakukan kegiatan pemasaran hasil riset dan pengembangan program serta kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan program.

Untuk mendukung tugas-tugas utama, DRP juga bertanggung jawab dalam menyediakan serta mengelola data dan informasi hasil kegiatan riset dan pengembangan program maupun publikasi yang dapat dipergunakan untuk membangun kompetensi lembaga maupun pegawai serta untuk keperluan pelanggan perbankan/ jasa keuangan.

2. Divisi Konsultasi dan Assessment Center

Divisi Konsultasi dan Assessment Center (DKA)

bertanggung jawab atas kegiatan konsultasi dan *assessment center*, baik atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dalam upaya untuk memperoleh pendapatan maupun dalam mendukung pengembangan program dan pengembangan pegawai. DKA bekeja sama dengan kelompok peneliti, konsultan, dan pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan konsultasi dan *assessment*. DKA juga berkoordinasi dengan Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis dalam pelaksanaan kegiatan menjual jasa konsultasi dan *assessment center*.

Jasa konsultansi yang ditawarkan antara lain dalam hal pengembangan organisasi seperti mendesain ulang organisasi, *performance management system* dan perencanaan karir serta perencanaan perusahaan (*corporate planning*). Selain itu ditawarkan layanan rekrutmen pegawai baru maupun *assessment* bagi pegawai untuk tujuan kenaikan jenjang golongan atau jabatan.

3. Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis

Secara ringkas, tugas Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis (DPA) adalah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemasaran, aliansi strategis dengan institusi nasional maupun internasional serta kegiatan kegiatan kehumasan dan *liaison*, untuk menunjang pengembangan program dan *corporate image building* lembaga.

Oleh karena itu DPA bertugas mengembangkan kerja sama aliansi strategis lembaga, pemasaran, dan kehumasan serta mengawasi pelaksanaannya dan mengendalikan mutunya. Dalam hal ini maka DPA bertugas untuk menyediakan jaringan aliansi strategis serta menjalin kerja sama dengan lembaga sejenis baik nasional maupun internasional.

Dalam kesehariannya, DPA melakukan koordinasi dengan DRP untuk mengidentifikasi

kebutuhan kerja sama dalam pengembangan program dan melakukan pengawasan pelaksanaannya. Untuk mendukung tugas-tugasnya, DPA juga berkoordinasi dengan divisi-divisi operasional lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan pemasaran dan kehumasan serta pengawasan pelaksanaannya. Selain itu DPA juga bertugas menyusun laporan rencana dan realisasi kegiatan kehumasan, *liaison*, dan pemasaran.

4. Divisi Penyelenggaraan Program Manajerial

Divisi Penyelenggaraan Program Manajerial (DPM) bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan manajerial untuk sumber daya manusia perbankan atau jasa keuangan, termasuk pengendalian mutunya. DPM mempunyai tugas utama dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan manajerial, melakukan monitoring, dan mengendalikan implementasinya. Untuk itu DPM bekerja sama dengan DRP dan kelompok peneliti, konsultan, dan pengajar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan manajerial. DPM juga berkoordinasi dengan DPA dalam kegiatan pemasaran program pendidikan dan pelatihan manajerial.

Pada akhir kegiatan pelatihan, DPM bertanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan manajerial yang minimal mencakup materi, instruktur, dan penyelenggaraan program.

5. Divisi Penyelenggaraan Program Keahlian

Divisi Penyelenggaraan Program Keahlian (DPK) bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keahlian untuk sumber daya manusia perbankan atau jasa keuangan, termasuk

pengendalian mutunya. DPK mempunyai tugas utama dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan keahlian, melakukan monitoring, dan mengendalikan implementasinya. Untuk itu DPK bekerja sama dengan DRP dan kelompok peneliti, konsultan, dan pengajar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keahlian. DPK juga berkoordinasi dengan DPA dalam kegiatan pemasaran program pendidikan dan pelatihan keahlian.

Pada akhir kegiatan pelatihan, DPK bertanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keahlian yang minimal mencakup materi, instruktur, dan penyelenggaraan program.

Tugas-tugas yang dijalankan oleh DKS antara lain adalah: melakukan kerja sama dengan satuan kerja lain dalam pemanfaatan hasil konsultasi dengan pengembangan keuangan syariah serta aliansi strategis dalam mengembangkan program lembaga maupun pegawai dengan tetap menjaga kode etik konsultasi; mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional untuk membentuk aliansi strategis dalam upaya pengembangan keuangan syariah; menyusun laporan hasil kerja sama nasional maupun internasional tersebut; serta melakukan koordinasi dengan kelompok peneliti, konsultan, dan pengajar untuk pelaksanaan proyek-proyek konsultasi dan pengembangan keuangan syariah.



Peserta pelatihan sedang melakukan kegiatan

6. Divisi Konsultasi dan Pengembangan Keuangan Syariah

Divisi Konsultasi dan Pengembangan Keuangan Syariah (DKS) yang juga disebut sebagai bagian dari *International Center for Development in Islamic Finance* (ICDIF) bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan konsultasi dan pengembangan keuangan syariah baik dalam upaya memperoleh pendapatan maupun mendukung pengembangan program dan pengembangan pegawai, serta bertanggung jawab dalam menjalin kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional untuk membentuk aliansi strategis dalam pengembangan keuangan syariah.

7. Divisi Penyelenggaraan Program Keuangan Syariah

Divisi Penyelenggaraan Program Keuangan Syariah (DPS) yang juga disebut sebagai bagian dari *International Center for Development in Islamic Finance* (ICDIF) bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keuangan syariah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mutu. Tugas utama DPS adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan keuangan syariah yang minimal mencakup materi, instruktur dan penyelenggaraan program. Untuk itu DPS berkoordinasi dengan kelompok peneliti, konsultan dan pengajar untuk melaksanakan

Khusus untuk Diklat SESPIBANK® telah terdaftar dan mendapatkan hak paten bagi LPPI sebagai satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan program dimaksud.

program-program pendidikan dan pelatihan keuangan syariah. Dalam kegiatan pemasaran program, DPS bekerja sama dengan Divisi Konsultasi dan Pengembangan Keuangan Syariah.

8. Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro

Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKM) bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan penelitian, pelatihan dan konsultasi serta kerja sama dengan lembaga/ institusi baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan keuangan mikro. Untuk itu PKM bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pelatihan dan konsultasi dalam pengembangan keuangan mikro; menyediakan data dan informasi hasil kegiatan penelitian, dan menyusun laporannya; serta melakukan kerja sama dengan pihak eksternal atau lembaga terkait dalam lembaga kegiatan penelitian dan pengembangan keuangan mikro.

9. Divisi Pengelolaan Kampus

Divisi Pengelolaan Kampus (DLK) bertanggung jawab atas pendayagunaan sarana dan prasarana kampus yang meliputi perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, dan pengamanannya yang dapat memberikan nilai tambah bagi lembaga. Dalam hal ini DLK mengoptimalkan pendayagunaan fasilitas kampus secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan lembaga.

Untuk itu DLK mempunyai tugas-tugas antara lain: melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan unit kerja lain untuk menyusun rencana pengadaan (baru maupun penggantian), pelaksanaan, pemanfaatan/ penggunaan

sarana dan prasarana kampus; menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (termasuk menyediakan jasa akomodasi dan konsumsi), kegiatan riset, konsultasi dan *assessment* serta kegiatan penunjang yang diperlukan lembaga (antara lain ruang *bourse game*) secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu; menyediakan fasilitas dan jaringan IT (*Information Technology*) baik untuk kepentingan perkantoran maupun penyelenggaraan program; serta koordinasi dengan Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis dalam kegiatan pemasaran fasilitas kampus yang tidak digunakan oleh lembaga kepada pihak lain.

10. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS) bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian organisasi dan sumber daya manusia, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya manajemen sumber daya manusia yang tepat, termasuk pengelolaan kebutuhan logistik, hukum dan kesekretariatan, dan urusan umum lainnya.

Dalam tugas sehari-hari, DOS berkoordinasi dengan divisi dan unit lain untuk menyusun rencana kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai dan mengawasi pelaksanaannya. Selain itu DOS juga bertugas untuk menyusun pedoman penyelenggaraan organisasi termasuk sistem dan prosedur kerja yang dapat mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas lembaga; menyusun pedoman manajemen sumber daya manusia yang meliputi sistem penerimaan, sistem penggajian, sistem pengembangan pegawai, sistem jalur karir termasuk manajemen

prestasi kerja, sistem mutasi dan promosi, tata tertib dan disiplin pegawai, serta sistem pemberhentian pegawai; menyusun pedoman pembuatan dokumen dan produk hukum serta sistem kearsipan yang lengkap, akurat, dan terkini.

11. Divisi Keuangan dan Anggaran

Divisi Keuangan dan Anggaran (DIK) bertanggung jawab atas perencanaan anggaran tahunan lembaga dan pengawasan pelaksanaannya. DIK juga bertanggung jawab atas manajemen keuangan melalui sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas rupiah dan valas yang tepat serta sistem pembukuan yang *accountable*.

Tugas-tugas utama DIK antara lain adalah: melakukan kompilasi rencana anggaran satuan kerja dan mengawasi pelaksanaannya; menyusun ketentuan dan sistematika anggaran tahunan lembaga, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan *budget review* secara berkala; menyusun laporan kinerja keuangan per divisi/ satuan kerja untuk bahan penilaian kinerja divisi/ satuan kerja dengan metode *Balance Score Card*; menyusun dan mengawasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, termasuk penempatan kelebihan dana pada aset yang produktif; menyusun dan mengawasi pelaksanaan sistem dan prosedur pembukuan/ akunting sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi lembaga; serta melaksanakan manajemen perpajakan.

12. Divisi Pengawasan Intern dan Manajemen Mutu

Divisi Pengawasan Internal dan Manajemen Mutu (DPI) bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur kerja, delegasi wewenang satuan kerja pelaksana. DPI juga bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas lembaga untuk mempertahankan dan/ atau meningkatkan mutu pelatihan.

DPI mempunyai tugas-tugas utama, yaitu antara lain: menyusun rencana pemeriksaan baik finansial maupun non finansial (manajemen akademis dan operasional) serta mutu/ kualitas pelaksanaan tugas satuan kerja pelaksana; memberi masukan kepada satuan kerja pelaksana dan melakukan koordinasi untuk menyusun sistem pengendalian yang *built-in* dalam sistem dan prosedur kerja serta delegasi wewenang; *surveillance* internal terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015; melaporkan kepada Direksi mengenai hasil pengawasan baik aktif maupun pasif serta mengajukan saran untuk perbaikan/ penyelesaian dan memantau tindak lanjutnya; melakukan pengawasan dan koordinasi dengan satuan kerja dalam pelaksanaan manajemen mutu dan membeikan saran perbaikan serta memonitor pelaksanaannya; dan membina hubungan dengan auditor eksternal baik untuk bidang keuangan maupun dalam kaitannya dengan penjaminan mutu.



LPPI membuka pelatihan Sespibank® sebanyak 2 batch. Untuk tahun 2017, Sespibank® dilaksanakan dalam waktu lebih singkat karena beberapa program dipadatkan, namun tidak mengurangi kualitas pendidikan.

Tampak foto wisuda Program Sespibank®

Perkembangan teknologi yang pesat nyatanya dapat mengubah cara suatu bisnis bekerja. Mau tidak mau, LPPI sebagai sebuah lembaga pendidikan juga harus bisa mengadopsi teknologi dengan cepat agar tidak ketinggalan zaman.

Teknologi Informasi	51
Sumber Daya Manusia	55
Pengajat Eksternal	58
Fasilitas	59

Teknologi Informasi



Peserta pelatihan sedang melakukan ujian online di ruang Amphiteater

Pendukung Bisnis LPPI IT

Perkembangan teknologi yang pesat nyatanya dapat mengubah cara suatu bisnis bekerja. Mau tidak mau, LPPI sebagai sebuah lembaga pendidikan juga harus bisa mengadopsi teknologi dengan cepat agar tidak ketinggalan zaman. LPPI menyadari bahwa komputerisasi hingga digitalisasi bisnis telah menjadi faktor esensial dibalik pertumbuhan bisnis, tak terkecuali di bidang pendidikan dan pelatihan. Maka di era digital ini, LPPI dituntut menjadi lebih kompetitif, mampu memberikan pelayanan kepada klien dan peserta didik, serta karyawan secara lebih baik, yang berdampak pada peningkatan profit.

Pentingnya transformasi digital bagi perusahaan telah diungkapkan oleh sejumlah riset. Salah satu riset datang dari IDC yang memprediksi 60 persen pemimpin perusahaan (CEO) di kawasan Asia Pasifik akan menempatkan transformasi teknologi informasi sebagai strategi utama perusahaan pada tahun 2017. Lalu, penelitian lainnya dari Capgemini mengatakan perusahaan yang melakukan transformasi teknologi informasi mendapatkan peningkatan 9 persen dalam pendapatan, 26 persen profit, dan 12 persen dalam penilaian pasar terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sejak 2010 lalu, LPPI mulai

merancang transformasi layanan teknologi informasi melalui sejumlah aplikasi dalam mendukung aktivitas bisnis di LPPI.

Transformasi TI dalam mendukung bisnis LPPI dimulai sejak 2011 dengan personil yang melekat pada satuan kerja atau divisi DLK. Sejalan dengan meningkatkan kebutuhan akan layanan TI, di tahun 2014, divisi DOS LPPI memperkuat tim TI LPPI dengan menunjuk satu Staf Ahli TI yang membawahi Ketua Tim TI, dua tenaga *Infrastructure Engineer* dan dua *Programmer*.

Adapun alur kerja dan dukungan TI kepada bisnis LPPI dapat diuraikan sebagai berikut. LPPI mempunyai lima bagian alur bisnis yang melibatkan beberapa divisi terkait di dalamnya. Agar alur kerja ini saling mendukung, maka tim TI LPPI menyiapkan sejumlah aplikasi pendukung alur kerja tersebut yang akan digunakan oleh Divisi terkait, yang secara tidak langsung sistem aplikasi tersebut terintegrasi, saling terkait satu dengan yang lain, mulai dari perencanaan hingga hasil.

Bagian pertama dari alur kerja LPPI dimulai dari rancangan kebutuhan pelatihan atau *Training Need Analysis* (TNA). Di bagian ini terkait dengan peran Divisi Riset, Divisi Pemasaran, dan Divisi Penyelenggara. Ketiga divisi ini

menggunakan aplikasi SIRAMA dan SIADIK. Pada bagian kedua adalah Design Program, dengan peran utamanya adalah Divisi Riset dan Fakultas (pengajar) dengan menggunakan aplikasi SIADIK dan SIKEJAR. Bagian ketiga dari alur kerja adalah *Delivery Programme*. Dalam bagian ini Divisi Penyelenggara dan Divisi Kampus yang bertugas menjalankan program dengan didukung oleh aplikasi dari TI LPPI seperti SIAKANG, SIADIK, SIKEJAR, SIASTRA, SIRUKA, SIRESTO.

Alur berikutnya adalah Evaluasi dan Laporan oleh Divisi Penyelenggara, Divisi Kampus, dan Audit. Dalam proses evaluasi ini, aplikasi TI yang digunakan adalah SADIK dan SIKEJAR.

Alur terakhir adalah tagihan yang akan dilakukan secara berkaitan oleh Divisi Keuangan, Divisi Penyelenggara, Divisi Kampus, dan Divisi Pemasaran. Aplikasi TI yang digunakan adalah SIAKANG.

Keterkaitan antar sistem informasi LPPI tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Secara umum, sebagai entitas bisnis, LPPI menggunakan

sistem informasi yang saling terkait dalam operasionalnya yang mencakup beberapa bagian utama.

Pertama, Pengelolaan Aktiva Tetap menggunakan aplikasi SIMANTAP. Kedua, Pengelolaan Aktivitas Diklat, Konsultasi dan Riset yang menggunakan aplikasi SIADIK dan SIKEJAR. Ketiga, Pengelolaan SDM dan Penggajian yang menggunakan aplikasi SIAPA, SIDAMAR, SISEKAR, dan SIAGA. Keempat, Pengelolaan Wisma, Kelas & Jasa Boga yang menggunakan aplikasi SIASRA, SIRUKA, dan SIRESTO. Kelima adalah sistem aplikasi pendukung lainnya seperti SIRAMA, *Phone Book*, SIARSIP, dan SISAKA.

Semua aplikasi tersebut bermuara pada sistem aplikasi SIAKANG yang menjadi inti dari keuangan dan pembiayaan LPPI. Aplikasi SIAKANG mengakomodasi tiga bagian penting yakni, Laporan dan Penagihan (Neraca, Rugi/Laba, Piutang, Tagihan), Monitoring dan Evaluasi (Pendapatan, Biaya, Anggaran), dan Analisa / Penunjang Keputusan (Produktivitas dan Efisiensi).



Tabel 4.1. Produk Aplikasi

NO.	JENIS APLIKASI	FUNGSI	PENGGUNA	PENGGUNA
1	SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Aktiva Tetap)	- Memberikan prosedur yang baku atas aktifitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai aktiva tetap mulai dari pengakuan sampai pada proses pelepasannya. - Memberikan informasi mengenai aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membeli, membangun sendiri, BOT, atau didapat dari donasi/hibah/sumbangan. - Menghasilkan catatan mengenai aktiva tetap yang andal dan dapat dipercaya. - Memperhitungkan alokasi biaya untuk penyusutan aktiva tetap, umur ekonomis, dan metode penyusutan yang digunakan.	DLK	SIMANTAP terintegrasi dengan SIAKANG
2	SIAPA (Sistem Informasi Aplikasi Pegawai)	- Mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian di LPPI. - Pegawai dapat melihat data pribadi masing-masing pegawai serta data umum pegawai lain. Para pegawai juga dapat mengajukan cuti melalui aplikasi ini. Selain itu, melalui aplikasi SIAPA juga dapat mengakses database SIAGA (Sistem Aplikasi Gaji). - Menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan LPPI.	DOS & Seluruh Pegawai	
3	SISEKAR (Sistem Informasi Kesehatan Karyawan)	Merekam catatan medis pegawai dan peserta, termasuk administrasi obat-obatan.	DOS	
4	SIDAMAR (Sistem Informasi Data Pelamar)	Mengolah data rekrutmen calon karyawan baru. Dengan menginput secara manual setiap aplikasi lamaran yang masuk ke LPPI, dan disesuaikan dengan kompetensi pelamar.	DOS	
5	SIADIK (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan)	Meghimpun database peserta, perangkat diklat & pencetakan sertifikat pelatihan.	DRP	
6	SIKEJAR (Sistem Informasi Kegiatan Pengajar)	- Aplikasi menjadi penghubung divisi penyelenggara program pelatihan dengan pengajar. Melalui aplikasi ini, pelaksana program pelatihan mengirimkan jadwal kepada fakulti terkait. Setiap pengajar yang menerima notifikasi melalui pesan singkat dan email, bisa merespon langsung dengan membalas bersedia atau tidak. - Aplikasi juga menghitung secara otomatis sesi mengajar para fakulti yang nanti berkaitan dengan honor mengajar.	DRP dan KFA	
7	SIASRA (Sistem Informasi Asrama)	Sebagai administrasi dan monitoring penggunaan kamar wisma, baik dari dalam maupun luar LPPI.	DLK	SIASRA terintegrasi dengan SIAKANG
8	SIRUKA (Sistem Informasi Ruang Kelas)	Sebagai administrasi dan monitoring penggunaan ruang kelas dan gedung serba guna, baik dari dalam maupun luar LPPI.	DLK	
9	SIARSIP (Sistem Informasi Arsip)	Mengelola database dokumen penting seperti surat keputusan direksi, surat perjanjian kerja sama, dokumen pajak, dan arsip penting lainnya.	DOS & Satker	
10	SISAKA (Sistem Informasi Perpustakaan)	Mempermudah peserta, pegawai, dan masyarakat mengakses koleksi judul buku, artikel, dan karya tulis yang dimiliki perpustakaan LPPI.	DRP	
11	SIAKANG (Sistem Informasi Aplikasi Keuangan & Anggaran)	Mengelola data keuangan semua satuan kerja, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pencairan. Sehingga arus keluar dan masuk dari semua kegiatan bisnis LPPI dapat termonitor dan tercatat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.	DIK & Satker	SIAKANG terintegrasi dengan semua sistem

Layanan IT Lainnya



Suasana Dealing Room

1. Survey Online UMKM - BPR

Berfungsi mengumpulkan data primer UMKM BPR se- Indonesia. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung proyek satuan kerja PKM.

2. Survey Online Penelitian Pengembangan SDM Institusi Keuangan

Berfungsi mengumpulkan kebutuhan pengembangan SDM di 115 Bank & perusahaan jasa keuangan non-bank di Indonesia. Aplikasi ini terkait dengan program Tim Riset DRP.

3. e-Tryout LPPI

LPPI juga menyediakan aplikasi persiapan dan pelatihan ujian sertifikasi secara *online*. Seperti Program Manajemen Risiko Mandiri yang dilaksanakan oleh DRP.

4. e-Recruitment

Aplikasi ini diselenggarakan secara *online* untuk rekrutmen calon pegawai perbankan. Proyek rekrutmen online ini dilaksanakan DKA.

5. Sales Activity Management (SAM)

Aplikasi simulasi untuk mengelola kegiatan tim marketing secara *real time* dan portfolio salesnya. Sejak 2011 LPPI mengembangkan 2 (dua) *software* baru yaitu: *Sales Activity Management (SAM)* untuk Officer dan *Sales Activity Management (SAM)* untuk Manager

6. Simulasi Money Market/Forex.

Ruang simulasi untuk pasar uang (*money market/forex*). Di dalam ruangan ini terdapat 10 kamar tertutup. Dilengkapi dengan perangkat komputer yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas pendukung lainnya adalah *LCD*, *sound system* dan *white board*.

7. Website

Sebagai media komunikasi dan informasi antara LPPI dan masyarakat, LPPI menyediakan *website* LPPI (www.lppi.or.id) yang tampilan barunya diluncurkan pada Desember 2017. Di dalamnya disediakan beragam fitur yang berisi informasi mengenai LPPI beserta program-programnya.

Sumber Daya Manusia



Pegawai LPPI tengah mengikuti kegiatan outbond.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dalam organisasi, baik itu untuk organisasi sosial (*non-profit organization*) maupun organisasi profit (*profit organization*). Maju mundurnya roda organisasi amat ditentukan dengan kualitas SDM-nya yang berperan sebagai penggerak (katalisator). Pandangan mengenai urgensi SDM ini benar-benar dipahami dan diresapi manajemen LPPI.

Sebagai lembaga yang bergerak di sektor pendidikan, manajemen LPPI memandang SDM yang berkualitas merupakan aset yang sangat berharga sekaligus fondasi bagi perkembangan kinerja organisasi saat ini dan masa yang akan mendatang.

Secara kuantitatif, pada 2017 ini total SDM yang dimiliki LPPI sebanyak 393 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 170 karyawan tetap, 49 tenaga honorer dan 174 karyawan *outsourc*e. Berdasarkan data tersebut, jumlah karyawan tetap di LPPI memiliki porsi sebesar 43 persen, hampir setara dengan tenaga *outsourc*e yang sebesar 44 persen sementara tenaga honorer dalam sebanyak 13 persen.

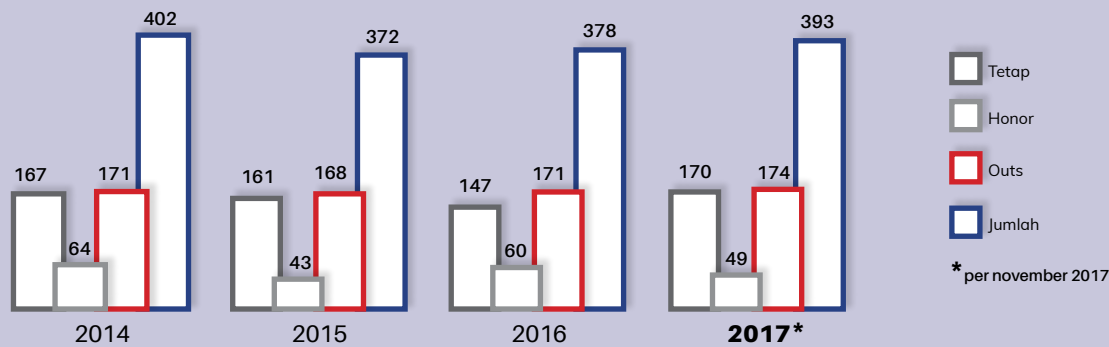
Jumlah ini meningkat dibanding catatan tahun 2016, di mana jumlah karyawan tercatat sebanyak 378 orang dan tahun 2015 sebanyak

372 orang. Namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2014, dimana jumlahnya mencapai 402 orang.

Bila mengacu kepada teori generasi (*Generation Theory*) yang dikemukakan Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall, Penguin, (2004) yang membedakan generasi berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu: (1) Generasi *Baby Boomer*, lahir 1946-1964 (usia 53 – 71 tahun); (2) Generasi X, lahir 1965-1980 (usia 37 – 52 tahun); (3) Generasi Y, lahir 1981-1994 (usia 23 - 36 tahun), sering disebut generasi *millennial*; (4) Generasi Z, lahir 1995-2010 (usia 7 - 22 tahun) (disebut juga *iGeneration*, *GenerasiNet*, *Generasi Internet*). DAN (5) Generasi Alpha, lahir 2011-2025. Maka, komposisi didominasi oleh Gen Y dan X, yaitu sebesar 57 persen, dengan rincian Gen Y (41%) dan Gen X (16%). Sisanya sebesar 43% adalah generasi *baby boomer*.

Gambar 4.1 Jumlah Karyawan LPPI 2014 - 2017

Sumber : Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS)



Pendidikan

Tingkat pendidikan karyawan didominasi jenjang strata 1 (S1) sebesar 52 persen, kemudian strata 2 (S2) sebanyak 26 persen, dan strata 3 (S3) sebesar 3 persen. Sisanya sebesar 19 persen terdiri dari pendidikan diploma dan sekolah menengah.

Jabatan

Jabatan terdiri dari struktural dan non-struktural. Karyawan yang menduduki jabatan struktural berjumlah 195 orang (89%), sementara karyawan yang menempati jabatan non-struktural sebanyak 24 orang (11%).

Selain kuantitas, manajemen LPPI juga sangat memperhatikan faktor kualitas. Sebagai upaya meningkatkan profesionalitas dan kualitas agar SDM LPPI memiliki daya saing, secara konsisten manajemen menyelenggarakan pelatihan atau mengirim karyawan untuk mengikuti beragam pelatihan, seminar, dan *workshop*. Dari beragam program yang diselenggarakan, ada yang terkait langsung dan menunjang pekerjaan (*psikomotorik*), ada juga yang bertujuan untuk mempertajam *softskill* (afektif), ada juga untuk mengembangkan wawasan dan mengasah analisa (*kognitif*). Hingga November 2017, terdapat 28 program yang diselenggarakan dan diikuti oleh 208 karyawan.

Tabel 4.2 Komposisi Berdasarkan Usia

Sumber : Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS)

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persen (%)	Gen
1	20-25	32	15%	Gen Y
2	26-30	24	11%	
3	31-40	33	15%	
4	41-45	20	9%	Gen X
5	46-50	37	17%	
6	51-55	46	21%	Gen BB
7	56-60	18	8%	
8	61-65	8	4%	
9	66-70	1	0%	
10	71-75	0	0%	
Jumlah		219	100%	

Tabel 4.3 Komposisi Berdasarkan Gender

Sumber : Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS)

No	Gender	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1	Pria	156	71%
2	Wanita	63	29%
Jumlah		219	100%

Tabel 4.4 Komposisi Sebaran Berdasarkan Status Perkawinan

Sumber : Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS)

No	Status	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1	Menikah	169	71%
2	Belum Menikah	50	29%
Jumlah		219	100%

Tabel 4.5 Komposisi Jabatan Struktural

Sumber : Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS)

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1	DIREKSI	4	2%
2	KADIV (GM)	13	6%
3	KABAG (MN)	13	6%
4	KASIE (AM)	30	14%
5	OFFICER	81	37%
6	ADMINISTRASI	41	19%
7	MESSENGER	13	6%
Jumlah		195	89%

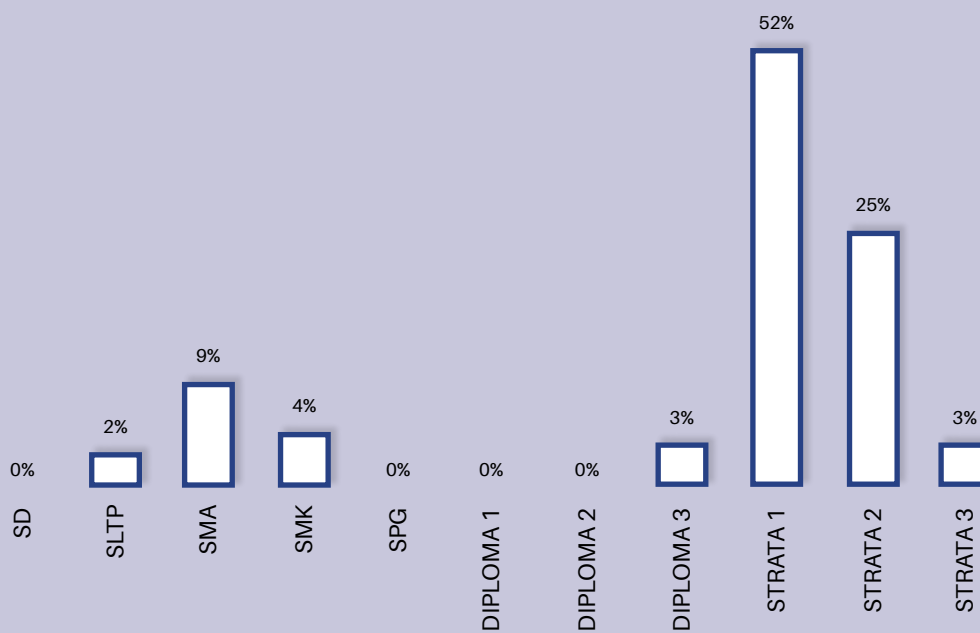
Tabel 4.6 Komposisi Jabatan Non-Struktural

Sumber : Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS)

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1	KONSULTAN	10	5%
2	FUNGSIONAL	4	2%
3	SENIOR FACULTY	5	2%
4	FACULTY	1	0%
5	JUNIOR FACULTY	4	2%
Jumlah		24	11%

Gambar 4.2 Komposisi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber : Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS)



Pengajar Eksternal

Dalam beberapa program, LPPI mengundang pengajar eksternal untuk menjadi nara sumber. Lebih dari 100 orang, dengan keahlian beragam

dan latar belakang, menjadi pengajar eksternal. Mulai dari akademisi, praktisi, hingga regulator. Berikut ini diantaranya :

Tabel 4. 7 Pengajar Eksternal LPPI

No	Pengajar Eksternal	Keterangan	Program
1	Iwan Jaya Azis	Guru Besar Ekonomi Cornell Univesity, AS dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI)	Sespibank
2	Rina Indiasuti	Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad)	Sespibank
3	Maryono	Dirut Bank Tabungan Negara (BTN)	Sespibank
4	Mulya E Siregar	Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Sespibank
5	Sunarso	Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Sespibank
6	Aviliani	Komisaris Bank Mandiri	Sespibank
7	I Supomo	Komisaris Independen Bank Permata	Sespibank
8	Yuslam Fauzi	Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM)	Sespibank
9	Halim Alamsyah	Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Sespibank
10	Budi Tampubolon	Direktur Utama BNI Life	Sespibank
11	Anika Faisal	Direktur BTPN	Sespibank
12	Iwan Nataliputra	Head Basel & Market Risk Bank Permata	Sespibank
13	Dody Budi Waluyo	Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter OJK	Sespibank
14	Anung Herlianto	Direktur Departemen Pengawasan Bank 3 OJK	Sespibank
15	Armida Alisjahbana	Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad)	Sespibank
16	Irwan Lubis	Deputi Komisioner OJK	Sespibank
17	Suwigno Budiman	Direktur BCA	Sespibank
18	Zulkifli Zaini	Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Sespibank
19	A. Tony Prasetyantono	Komisaris Bank Permata	Sespibank
20	Destry Damayanti	Komisioner LPS	Sespibank

Tabel 4.8 Komposisi Fakulti

Bidang Ajar	Jumlah Fakulti	Total Fakulti
<i>Management & Leadership</i>	35	35
<i>Banking Strategy & Operation</i>	23 Kredit 14 Funding & Services 12 Trade Finance 5 Finance & Accounting 11 IT & Bank Operation 3 Hukum 7 Treasury 10	135 Orang 76 Orang Praktisi Aktif &
<i>Risk Management</i>	Risk 11 GCG & Compliance 6 Audit 5	90 Orang Fakulti Eksternal
<i>Microbank</i>	5	
<i>Sharia</i>	25	

Fasilitas

FASILITAS PENDIDIKAN

Ruang Serba Guna

Ruang Serba Guna sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, *workshop*, diskusi *round table* yang berskala nasional maupun internasional yang dapat menampung sekitar 300 orang. Gedung ini dapat digunakan juga untuk *events* lain seperti pameran, resepsi pernikahan dan acara-acara lainnya yang dapat menampung sekitar 700 orang. Fasilitas yang terdapat pada Gedung Serba Guna, meliputi: meja kursi, *sound system*, *LCD*, *wireless mic* dan *motorized projection screen*.

Ruang Amphitheater

Terdapat 4 (empat) ruangan berbentuk *amphitheater* yang dapat menampung sekitar 40 sampai 75 orang. Ruang *amphitheater* ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti *sound system*, *LCD*, *wireless mic*, *motorized projection screen*, *clip chart* dan *white board*. Ruangan ini cocok untuk pelatihan, seminar, *workshop* maupun kegiatan-kegiatan lain seperti sosialisasi peraturan, rapat dinas dan lain-lain.



Ruang Kelas

Kampus LPPI mempunyai 26 ruang kelas berkapasitas 20-30 orang dan 2 ruang kelas berkapasitas 40 orang. Kesemua kelas dilengkapi dengan fasilitas TV monitor, *delegate microphone*, *sound system*, *LCD*, *motorized projection screen*, *wireless mic*, *clip chart* dan *white board*.

Ruang Bourse Game

Ruang kelas ini sebagai sarana pengajaran dan pelatihan Simulasi *Money Market/Forex*. Di dalamnya terdapat 10 ruangan yang tersekat disertai dengan peralatan komputer di tiap-tiap ruangan. Fasilitas lain yang terdapat di ruang ini adalah *LCD*, *sound system* dan *white board*.

SDM & Staff Profesional

Seluruh sarana yang ada di Kampus LPPI difasilitasi dan didukung oleh 221 staf sumber daya manusia, dimana 25 di antaranya merupakan staf profesional. Selain itu, LPPI juga memiliki 450 staf pengajar *on-call* yang terdiri dari para bankir aktif dan birokrat.

FASILITAS ASRAMA

Wisma Anggrek

Wisma Anggrek terdiri dari 12 unit, dimana masing-masing unit mempunyai 7 kamar. Kamar berkapasitas 2 orang (*single bed*) ini dilengkapi layanan 24 jam *nonstop* serta fasilitas mulai dari AC, televisi, kulkas, dispenser, telepon, jaringan internet, meja belajar, lemari pakaian, kamar mandi di setiap kamar dengan pilihan air mandi panas/dingin sampai layanan *laundry*. Sedangkan, di *lobby/ruang tamu* tersedia 2 koran nasional (Kompas dan Media Indonesia).

Wisma Bougenville

Wisma Bougenville terdiri dari 10 unit, dimana masing-masing unit terdiri 3 kamar di lantai atas dan 5 kamar di lantai bawah. Setiap kamar hanya menampung 1 orang. Terdapat layanan 24 jam *nonstop* dan fasilitas kamar mandi di setiap kamar dilengkapi dengan pilihan air mandi panas/dingin, tempat tidur (*single bed*), AC, televisi, kulkas, dispenser, telepon, jaringan *internet*, meja belajar, lemari pakaian, *white board* dan layanan *laundry*. Juga terdapat ruang tamu/*lobby/ruang belajar* bersama/diskusi dengan dilengkapi 2 koran nasional (Kompas dan Media Indonesia).



Wisma Edelweiss terdiri dari 6 kamar. Masing-masing kamar dapat menampung 2 orang dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Layanannya terdiri dari *service* 24 jam nonstop, serta fasilitas sofa dan kursi taman di bagian depan kamar, 2 koran nasional (Kompas dan Media Indonesia), kamar mandi dilengkapi dengan pilihan air mandi panas/dingin, *bathtub*, *spring bed* (*single bed*), AC, televisi, kulkas, dispenser, telepon, jaringan internet, meja belajar, lemari pakaian, karpet dan layanan *laundry*.

FASILITAS OLAHRAGA

Fitness Center

Kampus LPPI dilengkapi dengan pusat kebugaran (*fitness center*). Beberapa sarana terdapat di *fitness center* ini, seperti sarana latihan *out door* (*jogging track*) dengan pepohonan serta taman yang asri, sarana pelatihan *indoor* yang modern dengan memakai alat *cardio* (*treadmill*, *eliptical*, *stationary bike*), alat-alat latihan beban, palang sejajar dan palang tunggal. Arena kebugaran tubuh ini juga dilengkapi dengan fasilitas program kelas senam (*Aerobik*, *Taibo*, *Yoga*, *Osteoporosis*, dll). Semua kegiatan dilakukan dengan pengawasan/bimbingan dari tenaga ahli/instruktur yang terampil. Fasilitas lainnya adalah loker, kamar mandi dengan air dingin/panas, dan sauna.

Lapangan Futsal

Kampus LPPI menyediakan sarana lapangan *futsal in door* berukuran 13 m x 30 m, yang bisa dipakai oleh para peserta pelatihan, karyawan maupun umum, dilengkapi dengan fasilitas bola futsal, kamar mandi dan kamar ganti.

Lapangan Bulutangkis

Kampus LPPI menyediakan sarana olahraga bulutangkis *in door*, untuk para peserta pelatihan, karyawan maupun untuk umum, dilengkapi dengan fasilitas *shuttlecock* dan raket.

Wisma Cempaka

Wisma Cempaka terdiri dari 4 unit. Masing-masing unit terdiri dari 6 buah kamar dengan disertai 2 buah kamar mandi yang terdapat diluar kamar. Setiap kamar yang menampung 1 orang ini dilengkapi dengan layanan 24 jam *nonstop* dan fasilitas AC, televisi, kulkas, dispenser, telepon, jaringan internet, meja belajar, lemari pakaian, *white board* dan layanan *laundry*. Sedangkan ruang tamu/*lobby*/ruang belajar bersama/diskusi dengan dilengkapi 2 koran nasional (Kompas dan Media Indonesia).

Wisma Dahlia

Wisma Dahlia terdiri dari 4 unit, dimana masing-masing unit terdiri 3 kamar di lantai bawah disertai dengan 1 buah kamar mandi dan 5 kamar di lantai atas dengan 1 buah kamar mandi. Masing-masing kamar dapat menampung 1 orang dengan layanan 24 jam nonstop, ruang tamu/*lobby*/ruang belajar bersama/diskusi dengan dilengkapi 2 koran nasional (Kompas dan Media Indonesia), kamar mandi dilengkapi dengan pilihan air mandi panas/dingin, tempat tidur (*single bed*), AC, televisi, kulkas, dispenser, telepon, jaringan internet, meja belajar, lemari pakaian, *white board* dan layanan *laundry*.

Wisma Edelweiss

Selain sarana olahraga diatas, LPPI juga menyediakan beberapa sarana olahraga lainnya, seperti Tenis Meja dan *Bilyard*.



FASILITAS BOGA

Cafetaria

Berkapasitas 70 sampai 90 orang. Dilengkapi dengan akses internet gratis, televisi dan karaoke.

Cafetaria (*Indoor*)

Terdiri dari 2 Lantai (atas & bawah) dengan kapasitas sekitar 250 orang serta dilengkapi dengan sarana televisi.

FASILITAS LAIN

Hutan Kota

Luas lahan Kampus LPPI yang mencapai 5,7 hektar, sebagian areanya dihijaukan menjadi hutan kota. Di hutan kota ini ditanam sekitar 704 jenis pohon, seperti pohon mahoni, angsa, pinang, kemang, mangga, cemara, serta beberapa jenis tanaman bunga. Hutan Kota Kampus Bumi LPPI diresmikan pada tanggal

7 April 2011 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Deputy Gubernur Bank Indonesia selaku Dewan Kurator LPPI melalui Deputy Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi Mitroadmojo dan Direktur Utama LPPI Subarjo Joyosumarto. 704 jenis pohon yang ditanam bermakna sebagai tanggal diresmikannya Hutan Kota Kampus Bumi LPPI.

Aneka Pohon & Binatang

Selain hutan kota, kampus LPPI juga disemarakkan dengan berbagai aneka tanaman bunga dan beberapa jenis binatang unggas, seperti burung merpati yang sengaja dipelihara dan berjumlah sekitar 30 ekor serta beberapa jenis burung, lainnya seperti tekukur, perkutut dan beberapa jenis burung lainnya yang datang dan hinggap di pepohonan hutan kota.

Kantin Kampus IBS

Kampus LPPI juga menyediakan kantin yang dilengkapi dengan berbagai aneka makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Lokasinya berada di samping pintu gerbang kampus IBS.

Akses Internet (*Wi-Fi*)

Komitmen pelayanan LPPI terhadap kebutuhan dan kemudahan teknologi informasi telah diwujudkan melalui akses internet yang tersedia didalam lingkungan kampus LPPI. Melalui dukungan bandwidth sebesar 3 Mbps, akses internet mudah dan cepat dapat dinikmati oleh setiap orang di dalam lingkungan LPPI.

Lahan Parkir

Demi kenyamanan para tamu yang datang di LPPI, kami menyediakan lahan parkir yang tersebar di seluruh penjuru kampus LPPI. Lahan parkir di LPPI dapat menampung sekitar 500 kendaraan yang telah disesuaikan menurut peruntukannya, mulai dari halaman depan sampai dengan halaman belakang Kampus LPPI.

ATM

Para pengunjung dan peserta program di LPPI akan dipermudah untuk melakukan segala keperluan melalui akses transaksi ATM yang tersedia di lingkungan kampus LPPI. Saat ini, telah tersedia mesin ATM Bank DKI, ATM BRI, ATM BNI dan ATM Bank Mandiri.



Masjid LPPI



Taman Foto



Poliklinik

Masjid

Kampus LPPI memiliki Masjid dengan kapasitas 800 orang. Selain digunakan untuk keperluan ibadah bagi pegawai, peserta kursus dan masyarakat sekitar, fasilitas masjid ini juga dapat digunakan untuk keperluan akad nikah.

Taman Foto

Taman Foto ini berfungsi sebagai ucapan selamat datang sekaligus sarana untuk mengabadikan gambar para peserta pelatihan maupun para tamu. Letaknya berada di depan halaman perkantoran LPPI.

Koperasi dan Mini Market

Selain sebagai tempat simpan pinjam untuk para karyawan LPPI, Koperasi Karyawan LPPI juga menyediakan jasa foto copy, fax, warung telepon dan jasa pengiriman barang. Selain itu, Koperasi Karyawan LPPI juga mempunyai

mini market yang menyediakan aneka barang kebutuhan sehari-hari serta souvenir-souvenir yang menarik.

PERPUSTAKAAN

Perpustakaan LPPI memiliki lebih dari 15.000 judul koleksi buku. Selain koleksi buku, ada juga koleksi kliping yang berasal dari berbagai media cetak di Indonesia dengan topik khusus mengenai ekonomi, keuangan, dan perbankan.

POLIKLINIK

Kampus LPPI menyediakan sarana Poliklinik lengkap dengan tenaga medisnya untuk memberikan pertolongan pertama bagi para peserta program pelatihan dan juga karyawan LPPI.

A photograph of a library interior. Tall, light-colored wooden bookshelves with red backing panels line the walls, filled with books. Two people are in the aisle: a woman in a dark blue suit and a patterned hijab is reaching for a book on a shelf, and a man in a white shirt and dark trousers stands behind her, looking at a book he is holding. The ceiling has several rectangular fluorescent light fixtures. The floor is a light-colored carpet.

Untuk menunjang kegiatannya, LPPI memiliki perpustakaan yang cukup luas dan memiliki lebih dari 15.000 judul koleksi buku. Selain koleksi buku, perpustakaan LPPI memiliki koleksi lain berupa kliping yang berasal dari berbagai media cetak di Indonesia dengan topik khusus mengenai ekonomi, keuangan dan perbankan.

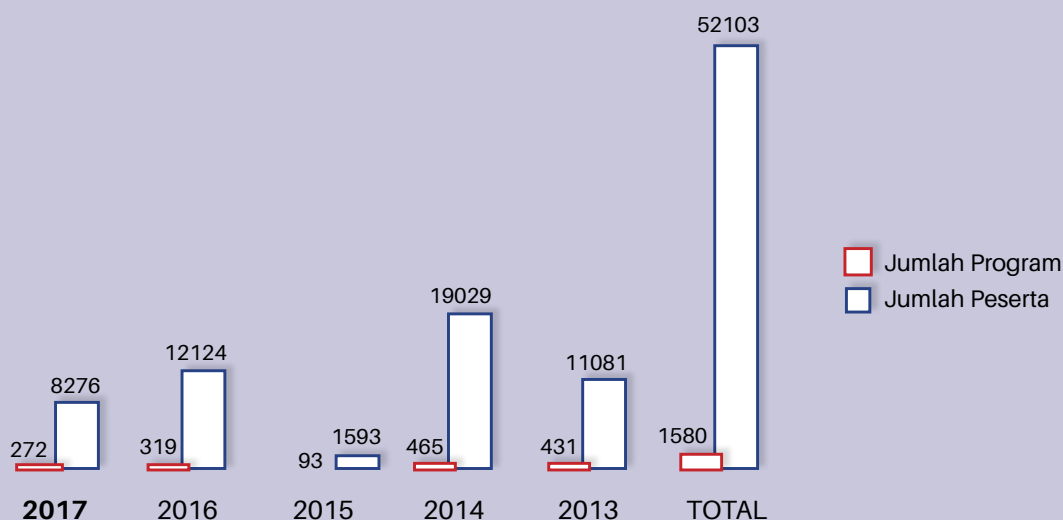
Sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan pelatihan, riset, dan konsultasi untuk industri keuangan, LPPI senantiasa menyelenggarakan program yang dibutuhkan pelaku industri agar pengelolaannya semakin baik, sehingga berdampak kepada pertumbuhan laba industri.

Kegiatan Utama

Sebagai lembaga yang fokus pada kegiatan pendidikan-pelatihan, riset, dan konsultasi untuk industri keuangan, LPPI senantiasa menyelenggarakan program-program yang dibutuhkan sehingga berdampak kepada

pertumbuhan laba industri. Sejak 2013 hingga 2017 terdapat 1580 program pelatihan, workshop, konsultasi, asesmen, dan refreshment dengan jumlah peserta sebanyak 52.103 orang.

Gambar 5.1. Jumlah Program dan Peserta 2013 – 2017
Sumber: Data DPM, DPK, DPS, & PKM (diolah)



Pelatihan (Training)

Khusus untuk pelatihan, terdiri dari 2 (dua) macam program, yaitu *reguler* dan *in house*. *Reguler* adalah pelatihan rutin yang pesertanya berasal dari institusi/ perusahaan/ lembaga keuangan yang berbeda-beda. Sementara *in house training* adalah pelatihan atas permintaan (*on demand*) dengan latar belakang peserta

yang relatif homogen, karena berasal dari satu perusahaan. LPPI juga mengadakan beberapa kerja sama dengan sejumlah institusi untuk meningkatkan mutu dan menyebarkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai *leadership* dan *ethic* industri keuangan. Di LPPI, program pelatihan bagi jasa keuangan

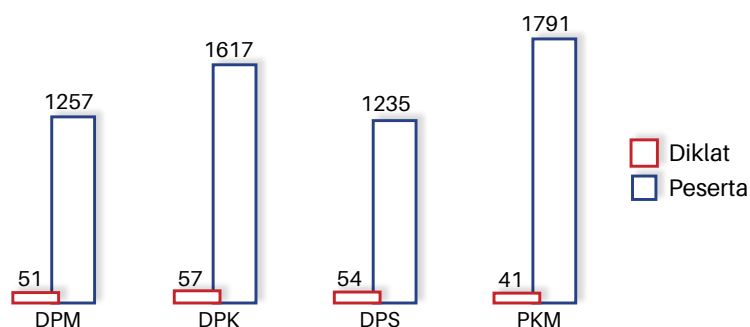
Gambar 5.2 Program Reguler dan *In House Training*
Sumber: Data DPM, DPK, DPS, & PKM (diolah)



perbankan konvensional dilakukan oleh Divisi Program Manajerial (DPM) dan Divisi Program Keahlian (DPK). Sedangkan program pelatihan perbankan syariah diselenggarakan oleh Divisi

Penyelenggaraan Program Syariah (DPS), dan program keuangan mikro oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKM).

Gambar 5.3 Jumlah Pelatihan & Peserta 2017
Sumber: Data DPM, DPK, DPS, & PKM (diolah)

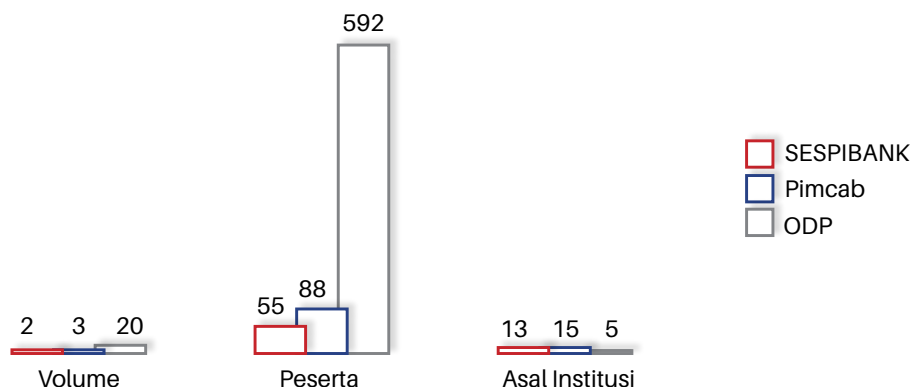


Divisi Penyelenggaraan Program Manajerial (DPM)

Pada 2017, terdapat 51 program pelatihan yang telah diselenggarakan DPM. Dari berbagai program pelatihan tersebut, baik reguler maupun *in house training*, ada 3 (tiga) program yang menjadi unggulan, yaitu: Sespibank® (Sekolah Staf Pimpinan Bank), Pelatihan Pimpinan Cabang (Pincab), dan ODP (*Officer Development Program*). Ketiga program tersebut didaulat menjadi program unggulan,

yaitu karena memang hanya LPPI satu-satunya yang menyelenggarakan di Indonesia, seperti program Sespibank dan Pincab, serta keunggulan dalam hal kurikulum dan para pengajarnya. Demikian juga dengan program ODP yang kurikulumnya disusun sedemikian sehingga mampu mempersiapkan calon-calon pemimpin yang menguasai teori dan praktik serta kepemimpinan dan etika yang baik.

Gambar 5.4. Realisasi Program Pelatihan Unggulan 2017
Divisi Program Manajerial (DPM)
Sumber : Data DPM (diolah)





Benchmarking Program Sespibank® ke LPPI ke Toronto, Kanada.

1. SESPIBANK®

Adalah jenjang tertinggi pendidikan profesi perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan bagi bankir senior profesional sebagai salah satu syarat untuk menduduki posisi puncak. Program ini dilengkapi dengan Sertifikasi *General Banking* Tingkat 3. Pesertanya adalah para senior manajer yang dipersiapkan untuk memegang posisi strategis dan diproyeksikan menjadi pimpinan bank/ lembaga keuangan (prioritas akan diberikan bagi mereka yang pernah mengikuti diklat pemimpin cabang atau yang sederajat). Program yang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari intensif ini telah melahirkan 67 angkatan. Pada tahun 2017, Program Sespibank diselenggarakan sebanyak dua (2) angkatan (yaitu Angkatan 66 dan 67) dengan 55 peserta yang berasal dari 13 institusi (Tabel 5.4).

2. Pemimpin Cabang

Program ini bertujuan melahirkan para pemimpin cabang yang mempunyai

kompetensi operasional maupun non-operasional dalam mengelola dan mengawasi semua kegiatan di cabang untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Program yang berlangsung selama 25 (dua puluh lima hari) ini sudah dilengkapi dengan Sertifikasi *General Banking* Tingkat 2. Pada tahun 2017, Program Pincab diselenggarakan sebanyak tiga (3) angkatan (yaitu Angkatan 185, 186 dan 187) dengan total peserta 88 orang yang berasal dari 15 institusi (Tabel 5.4).

3. Officer Development Program (ODP)

Program ini bertujuan mendidik para calon pegawai yang diseleksi ketat dengan kriteria tinggi, umumnya *fresh graduate*, agar siap bekerja menjadi bankir profesional sekaligus sebagai kader pemimpin masa depan. Pelatihan ini membekali peserta dengan *hard competencies* (pendanaan, perkreditan, jasa, dan lain-lain), serta *soft competencies* (*leadership*, etika, GRC, dan lain-lain) sekaligus. Program dijalankan dengan menggunakan sistem terpadu yang terdiri

dari program klasikal, *on the job training* (OJT) dan mentoring. Pada tahun 2017, telah diselenggarakan 20 (dua puluh) kelas Program ODP dengan total peserta 592 orang yang berasal dari 5 (lima) perusahaan, yaitu : Bank

BTN (13 kelas), Bank UOB (1 kelas), Bank Nagari (3 kelas), BPD DIY (1 kelas), Bank Sulselbar (1 kelas), dan Bank DKI (1 kelas). Pada Tabel 5.5 di bawah ini terlihat rincian dari Program ODP yang diselenggarakan:

Tabel 5.1. *Officer Development Program* (ODP)
Sumber : Data DPM (diolah)

No	Nama Program	Institusi	Jenis	Jumlah Peserta
1	ODP	UOB	<i>Inhouse</i>	26
2	ODP Angkatan 40 (A)	BTN	<i>Inhouse</i>	29
3	ODP Angkatan 40 (B)	BTN	<i>Inhouse</i>	29
4	ODP Angkatan 41 (A)	BTN	<i>Inhouse</i>	29
5	ODP Angkatan 41 (B)	BTN	<i>Inhouse</i>	29
6	ODP Angkatan 41 (C)	BTN	<i>Inhouse</i>	29
7	ODP Angkatan 41 (D)	BTN	<i>Inhouse</i>	29
8	ODP Angkatan 42 (A)	BTN	<i>Inhouse</i>	19
9	ODP Angkatan 42 (B)	BTN	<i>Inhouse</i>	19
10	ODP Angkatan 42 (C)	BTN	<i>Inhouse</i>	19
11	ODP Angkatan 43	BTN	<i>Inhouse</i>	33
12	ODP Angkatan 44	BTN	<i>Inhouse</i>	24
13	ODP Angkatan 45	BTN	<i>Inhouse</i>	40
14	ODP Angkatan 46	BTN	<i>Inhouse</i>	30
15	ODP Angkatan 1	Bank Nagari	<i>Inhouse</i>	38
16	ODP Angkatan 2	Bank Nagari	<i>Inhouse</i>	38
17	ODP Angkatan 3	Bank Nagari	<i>Inhouse</i>	38
18	ODP Angkatan 1	Bank Sulselbar	<i>Inhouse</i>	31
19	ODP	BPD DIY	<i>Inhouse</i>	38
20	ODP Angkatan 5	BANK DKI	<i>Inhouse</i>	25
Jumlah				592

Selain tiga program unggulan tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) program lain (reguler dan *inhouse*) yang terselenggara karena banyak diminati dan dibutuhkan industri, seperti: Pelatihan Pemimpin Cabang Pembantu, *Corporate Leadership Basic Training*, *Corporate Leadership Advance Training*, *Corporate Leadership for Executive Training*, *Improving Branch Performing for*

Branch Manager, *Staff Development Program* (SDP), *Supervisor Development Program*, *Basic Banking Knowledge for ODP*, dan sebagainya, seperti yang tercantum di Tabel 5.2 di bawah ini. Dua puluh enam program tersebut diikuti oleh 512 peserta dari berbagai perusahaan jasa keuangan, di antaranya Taspen, Bank Commonwealth, Kospin Jasa, Bank Sulselbar, BTN, dan Bank Nagari.

Tabel 5.2. Penyelenggaraan Program Pelatihan Lain
Sumber : Data DPM (diolah)

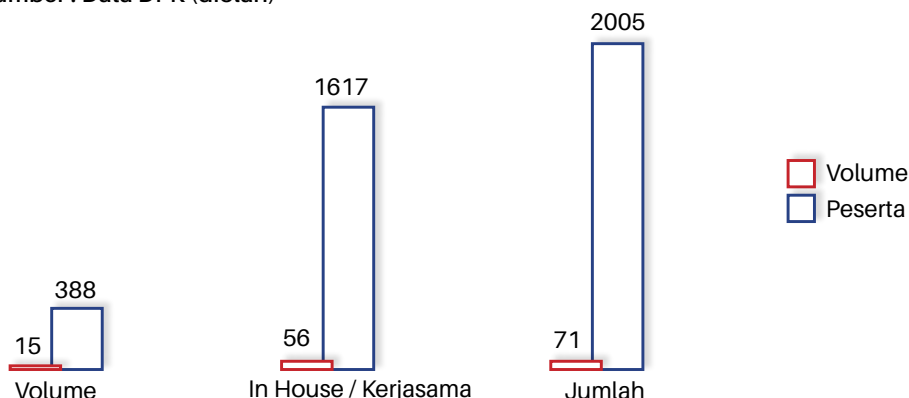
No	Nama Program	Institusi
1	Pemimpin Cabang Pembantu 23	8
2	Pemimpin Cabang Pembantu 24	10
3	Pemimpin Cabang Pembantu 25	10
4	Corporate Leadership Basic Training Batch 7	9
5	Corporate Leadership Basic Training Batch 8	28
6	Corporate Leadership Basic Training Batch 9	15
7	Corporate Leadership Advance Training Batch 5	13
8	Corporate Leadership Advance Training Batch 6	14
9	Corporate Leadership for Executive Batch 2	16
10	Basic Banking Knowledge for ODP Batch 2	24
11	General Banking	10
12	Improving Branch Performance for Branch Manager 1	10
13	Kepala Kantor Kas	20
14	Improving Branch Performance for Branch Manager 2	10
15	Improving Sub Branch Manager Batch 1	20
16	Staff Development Program Batch 1	18
17	Staff Development Program (SDP) A	30
18	Staff Development Program (SDP) B	30
19	Staff Development Program (SDP) C	30
20	Staff Development Program (SDP) C	30
21	Officer Orientation Program	14
22	Bechmarking Pimcab 185	35
23	Bechmarking Pimcab 186	34
24	Bechmarking Pimcab 187	21
25	Bechmarking Sespibank 66	23
26	Bechmarking Sespibank 67	30
Jumlah		512

Divisi Penyelenggaraan Program Keahlian (DPK)

Program pelatihan reguler unggulan yang diselenggarakan oleh DPK adalah Program *Basic Treasury* dan PBJJ Analisis Kredit dan Manajemen BPR. Selain itu, terdapat dua belas (12) program reguler yang dilaksanakan pada tahun 2017, dengan jumlah peserta mencapai 388 orang, yaitu: Program APU PPT, *Loan Syndication*, Manajemen Risiko Operasional, Manajemen Risiko Kredit, Analisis Kredit Umum, Analisis Kredit Ritel, Analisis Kredit

Komersial, Restrukturisasi Kredit, *General Banking Compliance*, *Basic ALMA for Branch Manager*, *Funding Officer*, *Leadership and Selling Skill*, *Service Excellence*, *Investment Banking*, Grafonomi, Sertifikasi Manajemen Risiko, Refreshment Kredit. Tahun 2017 DPK juga menyelenggarakan *in house training* yang terdiri dari 56 program yang diikuti oleh 1617 peserta.

Gambar 5.5. Realisasi Program Pelatihan 2017 Divisi Penyelenggaraan Program Keahlian (DPK)
Sumber : Data DPK (diolah)



1. Basic Treasury

Program yang bertujuan membekali dan meningkatkan kompetensi peserta mengenai pengetahuan dasar *treasury*. Peserta program adalah para calon *junior dealer*, ataupun *junior dealer*, serta akuntan dan *auditor treasury* atau pegawai dari unit-unit lain yang terkait dengan transaksi *treasury* baik langsung maupun tak langsung. Program ini diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari kerja secara intensif. Sejak awal diselenggarakan hingga tahun 2017, Program *Basic Treasury* sudah melahirkan 47 angkatan. Tahun 2017 ini telah berjalan Angkatan 45 dan 46 yang masing-masing diikuti oleh 10 peserta.

2. Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ)

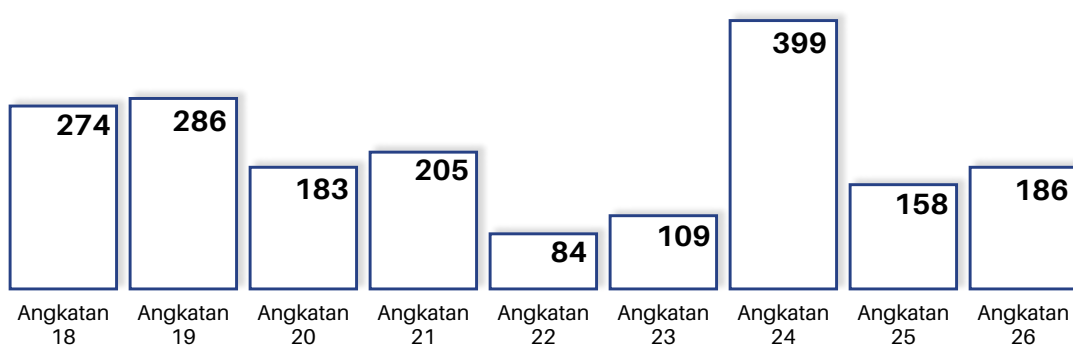
Sekitar tahun 1980-an, LPPI mulai menyelenggarakan Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ). Program ini termasuk yang pertama kali ada di Indonesia. Setelah berjalan selama 1 tahun, barulah Universitas Terbuka (UT) menyelenggarakan program yang sama. Awalnya PBJJ ditujukan untuk mendukung

perbankan menyiapkan karyawannya mengurus kredit untuk usaha kecil (KIK/KMKP).

Kegiatan belajar dalam PBJJ dilaksanakan sesuai jadwal yang disertakan bersamaan dengan pengiriman paket belajar secara bertahap. Setelah selesai, periode belajar untuk satu paket diakhiri dengan Tes Akhir Modul (TAM). TAM dilaksanakan secara bersama di kantor cabang yang disepakati oleh peserta di satu kota yang sama. Setelah semua TAM selesai, peserta diberi waktu untuk mempersiapkan ujian akhir komprehensif yang diselenggarakan di Kantor Cabang Bank Indonesia setempat dan diawasi oleh petugas LPPI.

Total peserta yang mengikuti PBJJ sejak September 2011 hingga Februari 2018 tercatat sebanyak 2784 orang, yang terdiri dari 1884 orang peserta PBJJ Analisis Kredit dan 900 orang peserta PBJJ Manajemen BPR. Sampai dengan tahun 2017 telah terselenggara hingga 26 angkatan PBJJ Analisis Kredit dan 59

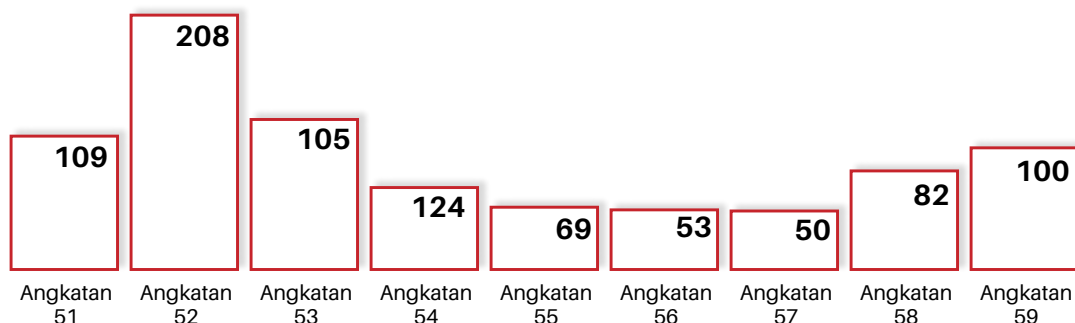
Gambar 5.6. PBJJ Analisis Kredit
Sumber : Data DPK (diolah)





Narasi????????????????????

Gambar 5.7. PBJJ Manajemen BPR
Sumber : Data DPK (diolah)



angkatan Manajemen BPR, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

3. Program *In-House Training*

Sepanjang tahun 2017 terdapat 56 program *inhouse* yang diikuti oleh 1606 peserta, yaitu Program Analisis Kredit, Analisis *Trade Financing*, Asuransi, *Audit in Banking*, *Basic ALMA*, *Branch Manager for Manager*, *Cash Management*, *Funding Officer*, *General Banking*,

Grafonomi, *Invenstement Banking*, *Leadership and Selling*, *Protokoler and Secretary Program*.

a. Analisis Kredit

Pada tahun 2017, program Analisis Kredit ini dilaksanakan 11 kali yang diikuti oleh 360 orang peserta dari lima (5) perusahaan jasa keuangan bank dan non-bank, yaitu: Jamkrindo, Jasindo, Askrindo, ASEI, dan Bank NTT, seperti yang terlihat berikut ini:

Tabel 5.3. Program Analisis Kredit 2017
Sumber : Data DPK (diolah)

No	Nama Program	Perusahaan	Jumlah Peserta
1	Analisis Kredit Batch 10	Jamkrindo	40
2	Analisis Kredit Batch 5	Jamkrindo	40
3	Analisis Kredit Batch 7	Jamkrindo	40
4	Analisis Kredit Batch 8	Jamkrindo	40
5	Analisis Kredit Batch 9	Jamkrindo	40
6	Analisis Kredit Batch 6	Jamkrindo	37
7	Analisis Kredit Konsumer	Jasindo	20
8	Analisis Kredit Level 2	Askrindo	25
9	Analisis Kredit Modal Kerja	ASEI	20
10	Analisis Kredit	Bank NTT	33
11	Analisis Kredit Tk. Pertama Batch 2	Askrindo	25
Jumlah			360

b. Grafonomi

Dengan mengikuti pelatihan grafonomi, peserta dapat memahami dan menguasai bahasa tulisan maupun tanda tangan sebagai tindakan pengaman untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pemalsuan terhadap tanda

tangan, tulisan tangan, maupun dokumen pada umumnya. Pada tahun 2017, program ini dilaksanakan 8 kali, dengan peserta sebanyak 200 orang. Terdapat 3 perusahaan jasa keuangan bank yang menjadi klien pada program General Banking, yaitu : Bank Kalteng, Bank Resona Perdania, dan Bank UOB, seperti

Tabel 5.4. Program Grafonomi 2017
Sumber : Data DPK (diolah)

No	Nama Program	Perusahaan	Jumlah Peserta
1	Grafonomi Batch 1	Bank DKI	25
2	Grafonomi Batch 2	Bank DKI	25
3	Grafonomi Batch 3	Bank DKI	25
4	Grafonomi Batch 4	Bank DKI	25
5	Grafonomi Batch 5	Bank DKI	25
6	Grafonomi Batch 6	Bank DKI	25
7	Grafonomi Batch 7	Bank DKI	25
8	Grafonomi Batch 8	Bank DKI	25
Jumlah			200

terlampir berikut rinciannya:

c. General Banking

Pada tahun 2017 ini, program General Banking dilaksanakan 6 kali yang diikuti oleh 200

peserta. Terdapat 3 perusahaan jasa keuangan bank yang menjadi klien pada program General Banking, yaitu : Bank Kalteng, Bank Resona Perdania, dan Bank UOB, seperti berikut ini:

Tabel 5.5. Program General Banking 2017
Sumber : Data DPK (diolah)

No	Nama Program	Perusahaan	Jumlah Peserta
1	General Banking Level 1	Bank Kalteng	55
2	General Banking Level 1	Bank Resona Perdania	10
3	General Banking Compliance	Bank UOB	35
4	General Banking Compliance	Bank UOB	35
5	General Banking Compliance	Bank UOB	35
6	General Banking Compliance	Bank UOB	30
Jumlah			200

d. *Protocoler & Secretary*

Tahun 2017 telah dilaksanakan 5 (lima) angkatan Program *Protocoler & Secretary* yang

diikuti oleh 150 orang peserta, yang semuanya berasal dari bank bjb, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6. *Protocoler & Secretary Program 2017*

Sumber : Data DPK (diolah)

No	Nama Program	Perusahaan	Jumlah Peserta
1	Protocoler & Secretary Program Batch 1	Bank BJB	30
2	Protocoler & Secretary Program Batch 2	Bank BJB	30
3	Protokoler & Secretary Program Batch 3	Bank BJB	30
4	Protokoler & Secretary Program Batch 4	Bank BJB	30
5	Protokoler & Secretary Program Batch 5	Bank BJB	30
Jumlah			150

e. *Investment Banking*

Pada tahun 2017 telah diselenggarakan 3 (tiga) kali Program *Investment Banking* dengan

peserta sebanyak 77 orang yang berasal dari Bank BNI, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7. *Investsmen Banking Program 2017*

Sumber : Data DPK (diolah)

No	Nama Program	Perusahaan	Jumlah Peserta
1	Investment Banking Batch 2	Bank BNI	15
2	Investment Banking Batch 3	Bank BNI	32
3	Investment Banking Batch 4	Bank BNI	30
Jumlah			77

f. *Selling bagi Relationship Manager*

Tahun 2017 terdapat salah satu program soft skill yang berjalan dengan baik, yaitu Program *Selling bagi Relationship Manager*. Program

ini dijalankan dalam tiga (3) angkatan, dengan jumlah peserta 75 orang, yang berasal dari Bank DKI sebagai berikut:

Tabel 5.8. Program Selling bagi Relationship Manager 2017

Sumber : Data DPK (diolah)

No	Nama Program	Perusahaan	Jumlah Peserta
1	Selling bagi Relationship Manager Batch 1	Bank DKI	25
2	Selling bagi Relationship Manager Batch 2	Bank DKI	25
3	Selling bagi Relationship Manager Batch 3	Bank DKI	25
Jumlah			75

g. Program Lain

Selain program-program yang telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 2017 ini telah terselenggara 16 program *inhouse* lainnya yang bekerja sama dengan 10 lembaga, baik pemerintah maupun perusahaan swasta serta

jasa keuangan, seperti: ASEI, Bank Royal, Bank BJB, Bank Kalteng, Bank DKI, Askrida, Bank Royal, Bank BNP, Kementerian Keuangan, dan Jamkrida. Seluruh program tersebut diikuti oleh 404 peserta dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.9. Program *Inhouse Training* Lainnya DPK 2017
Sumber : Data DPK (diolah)

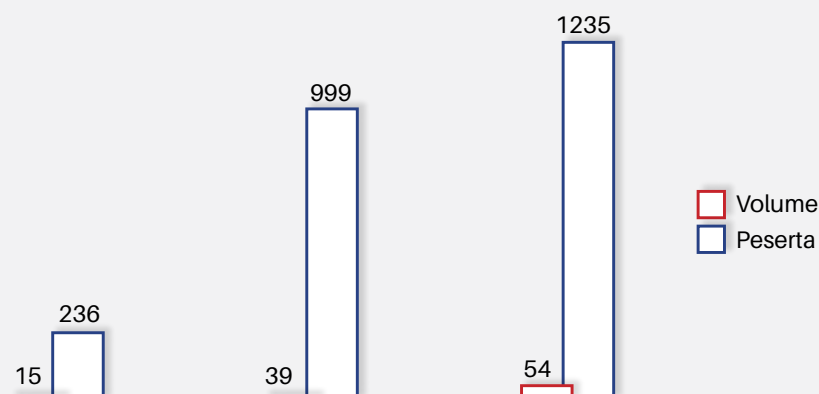
No	Nama Program	Perusahaan	Jumlah Peserta
1.	Analisis Trade Finacing Asuransi	ASEI	20
2.	Audit in Banking	Bank Royal	8
3.	Basic ALMA for Branch Manager	Bank BJB	31
4.	Branch Manager for Manager Batch 2	Bank BJB	30
5.	Cash Management	Bank BJB	30
6.	Funding Officer	Bank Kalteng	40
7.	Hukum dalam Praktik Operasional Bank Batch 3	Bank DKI	18
8.	Leadership & Selling Skill	Bank Kalteng	45
9.	Manajemen Risiko & GCG	Askrida	20
10.	Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 1	Bank Agris	20
11.	Penyelesaian Kredit Bermasalah Angkatan 1	Bank Royal	25
12.	Penyelesaian Kredit Bermasalah Angkatan 2	Bank Royal	25
13.	Refreshment Analisis Kredit	Bank BNP	30
14.	Refreshment Kredit	Bank BNP	30
15.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Kemenkeu	32
16.	Service Excellence	Jamkrida	21
Jumlah			404

Divisi Penyelenggaraan Program Syariah (DPS)

DPS menyelenggarakan pelatihan berbasis syariah yang terdiri dari program reguler dan *inhouse*. Selain program pelatihan, Divisi Syariah juga menyelenggarakan program

konsultasi, yang pada tahun ini menangani 39 program konsultasi dan asesmen termasuk Program Konsultansi Konversi Bank NTB Konvensional menjadi Syariah.

Gambar 5.8. Realisasi Pelatihan Reguler dan *Inhouse* 2017
Divisi Penyelenggaraan Program Syariah (DPS)
Sumber : Data DPS (diolah)



1. Program Reguler

Tahun 2017 DPS berhasil menyelenggarakan 15 program reguler. Dengan total peserta sebanyak 244 orang. Program reguler mempunyai beberapa program unggulan, yaitu antara lain Program PDPS (Pendidikan Dasar Perbankan Syariah). Program ini hingga tahun 2017 telah melahirkan 101 angkatan dan pada tahun ini 2017 ini telah terselenggara 4 (empat) angkatan, yaitu Angkatan 98 – 101 untuk PDPS reguler dengan jumlah peserta sebanyak 59 orang atau 24% dari total peserta reguler. Sementara untuk PDPS *in house*, terselenggara 18 kali dengan peserta yang berasal dari beragam bank dan jumlah keseluruhan mencapai 463 orang. Program

unggulan lainnya adalah Pelatihan Aspek Legal & Akad Bank Syariah untuk Notaris yang pada tahun ini terselenggara 6 (enam) kali dengan jumlah peserta sebanyak 161 orang dan hingga tahun ini mencapai 53 angkatan. Pada tahun ini Program Aspek Legal & Akad Bank Syariah untuk Notaris menjadi program yang paling besar memberikan kontribusi jumlah peserta, yaitu 66% dari total peserta program reguler.

Program lainnya, yaitu Pelatihan *Treasury Bank Syariah Angkatan 4* dan *Branch Manager Course of IB* serta *Benchmarking Branch Manager Course of IB Batch 19* yang diikuti oleh 24 peserta atau sekitar 10% dari total peserta reguler, seperti terlihat berikut ini:

Tabel 5.10. Program Pelatihan Reguler Syariah 2017
Sumber : Data DPS (diolah)

No	Nama Program	Perusahaan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Angkatan 96	Reguler	9
2.	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Angkatan 97	Reguler	9
3.	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Angkatan 98	Reguler	15
4.	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Angkatan 99	Reguler	9
5.	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Angkatan 100	Reguler	11
6.	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Angkatan 101	Reguler	6
7.	Aspek Legal & Akad Bank Syariah untuk Notaris Angkt 48	Reguler	9
8.	Aspek Legal & Akad Bank Syariah untuk Notaris Angkt 49	Reguler	14
9.	Aspek Legal & Akad Bank Syariah untuk Notaris Angkt 50	Reguler	49
10.	Aspek Legal & Akad Bank Syariah untuk Notaris Angkt 51	Reguler	22
11.	Aspek Legal & Akad Bank Syariah untuk Notaris Angkt 52	Reguler	15
12.	Aspek Legal & Akad Bank Syariah untuk Notaris Angkt 53	Reguler	52
13.	Pelatihan Treasury Bank Syariah - Angkatan 4	Reguler	8
14.	Branch Manager Course of IB Reguler Batch 19	Reguler	8
15.	Benchmarking Branch Manager Course of IB Batch 19	Reguler	8
Jumlah			244

2. Program Inhouse

Tahun 2017 DPS berhasil menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan jasa keuangan untuk menyelenggarakan 39 program *inhouse*, yaitu dengan 7 bank syariah: Bank NTB, Bank Riau Kepri, Bank DKI, Bank Syariah Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank BRI, dan Bank Aceh. Total peserta program *inhouse* tersebut sebanyak 991 orang.

Tahun 2017 ini Bank NTB berkontribusi paling besar terhadap jumlah program sekaligus peserta. Terdapat 18 program yang diselenggarakan dengan 513 peserta atau 52% dari total peserta *inhouse*. Kontribusi selanjutnya berasal dari Bank Riau Kepri, dengan 7 program dan 164 peserta atau 16.5% dari total peserta *inhouse*. Bank DKI dan Bank Syariah Bukopin bersama-sama menjalankan

lima (5) program pelatihan, namun jumlah pesertanya berbeda. Bank DKI, 105 orang atau 10.5%, dan Bank Syariah Bukopin 99 orang atau 10%. Selanjutnya adalah BNI Syariah (55 orang),

Bank BRI (25 orang) dan Bank Aceh (30 orang), yang menyumbang 11% dari total peserta, seperti terlihat berikut ini:

Tabel 5.11. Program Pelatihan *Inhouse* Syariah 2017
Sumber : Data DPS (diolah)

No	Perusahaan	Program	Jumlah Peserta	Persentase Peserta (%)
1.	Bank NTB	18	513	52
2.	Bank Riau Kepri	7	164	16.5
3.	Bank DKI	5	105	10.5%
4.	Bank Syariah Bukopin	5	99	10%
5.	BNI Syariah	2	55	11%
6.	Bank Aceh	1	30	
7.	Bank BRI	1	25	
Jumlah		39	991	100%



Program Perbankan Syariah

Proram *inhouse* yang menjadi unggulan adalah Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS). Pada tahun ini program tersebut diselenggarakan 18 kali dengan 463 peserta, bekerja sama dengan 5 perusahaan jasa keuangan, yaitu Bank NTB, Bank Riau Kepri, Bank DKI, Bank Syariah Bukopin, dan Bank

BNI Syariah. Program lain yang terselenggara adalah IB *Basic + Financing Analysis* Batch 1 - 3 dengan 84 peserta, diikuti oleh Pelatihan Analisa Pembiayaan Syariah dengan 49 peserta, Pelatihan Gadaai Bank Syariah dan Pelatihan Analisa Pembiayaan Ritel dengan peserta masing-masing sebanyak 46 dan 34 orang.

Program selanjutnya adalah *IB Basic First Line Manager* dan *IB Branch Manager Course* dengan jumlah peserta 50 orang dan 40 orang, serta program-program lainnya (*iB Basic + Accounting, Islamic Banking Legal, iB Basic + Financing Operation, iB Risk Management &*

Compliance, Sub-Branch Manager Course of Islamic Bank, Pelatihan Akuntansi Bank Syariah, Pelatihan Audit Bank Syariah, dan Islamic Banking Account Officer) yang diikuti oleh 225 peserta, seperti rincian berikut ini:

Tabel 5.12. Program Pelatihan Inhouse Syariah dan Jumlah Peserta
Sumber : Data DPS (diolah)

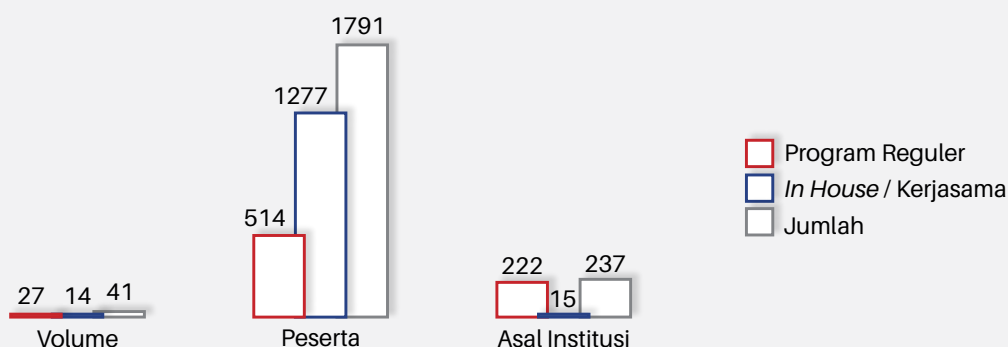
No	Perusahaan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah 1 - 18	463
2.	IB Basic + Financing Analysis Batch 1 - 3	84
3.	Pelatihan Analisa Pembiayaan Syariah Angkatan 1 dan 2	49
4.	Pelatihan Gadai Bank Syariah Angkatan 1 dan 2	46
5.	Pelatihan Analisa Pembiayaan Ritel Angkatan 1 dan 2	34
6.	iB Basic + First Line Manager Angkatan 1 dan 2	50
7.	IB Branch Manager Course Batch 1 dan 2	40
8.	Program lain	225
Jumlah		991

Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKM)

Program mikro diinisiasi dan diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKM). Pada tahun 2017 terdapat 41 program yang diselenggarakan

dengan 1791 peserta dari 237 institusi, yang terdiri dari program reguler dan program *inhouse*.

Gambar 5.9. Realisasi Diklat 2017
Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKM)
Sumber : Data PKM (diolah)



1. Program Reguler

Tahun 2017 PKM berhasil menyelenggarakan 27 program reguler dengan total peserta sebanyak 514 orang yang berasal dari 222 institusi. Adapun program reguler yang menjadi unggulan adalah Pelatihan Internal Auditor untuk BPR dan Pelatihan APU-PPT. Tahun 2017 Program Internal Auditor terlaksana 2 kali (angkatan 7-8) dengan 44 peserta. Sedangkan Program APU-PPT untuk BPR terselenggara 2 kali (angkatan 6-7) dengan 36 peserta. Selanjutnya adalah program *Service Excellence* untuk Karyawan BPR yang sepanjang 2017

sudah terselenggara 2 kali (angkatan 5-6) dengan 18 peserta.

Pelatihan lain yang diselenggarakan PKM adalah: Analisa Kredit Investasi UMKM, Aspek Hukum Perbankan BPR, Manajemen Operasional BPR, Pemasaran Dana untuk BPR, Menyusun Remunerasi BPR, *Loan Pricing*, *Service Excellence* dan Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai BPR, Rencana Bisnis BPR, Audit IT untuk BPR, Aspek Hukum dalam *Collection*, dengan rincian berikut ini:

Tabel 5.13. Realisasi Pelatihan Reguler PKM 2017
Sumber : Data PKM(diolah)

No	Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Peserta
1	ALMA BPR Angkatan 1	8	15
2	Analisa Kredit Investasi UMKM untuk BPR Angkatan 1	11	26
3	Analisa Kredit Konsumtif untuk BPR Angkatan 2	7	23
4	Analisa Kredit Konsumtif untuk BPR Angkatan 3	10	37
5	Analisa Kredit Modal Kerja UMKM untuk BPR Angkatan 2	8	18
6	Analisa Kredit Modal Kerja UMKM untuk BPR Angkatan 3	8	22
7	APU PPT untuk BPR Angkatan 6	5	18
8	APU PPT untuk BPR Angkatan 7	10	18
9	Aspek Hukum Perbankan BPR Angkatan 6	12	15
10	Aspek Hukum Perbankan BPR Angkatan 7	12	22
11	Audit IT untuk BPR Angkatan 1	5	15
12	Impelementasi Manajemen Risiko BPR Angkatan 2	5	11
13	Internal Auditor untuk BPR Angkatan 7	13	23
14	Internal Auditor untuk BPR Angkatan 8	10	21
15	Leadership Transformation for BPR Angkatan 1	10	29
16	Manajemen KPI untuk BPR Angkatan 4	4	11
17	Manajemen KPI untuk BPR Angkatan 5	10	16
18	Manajemen Operasional BPR Angkatan 1	12	32
19	Menyusun Remunerasi BPR Angkatan 2	6	12
20	Menyusun Remunerasi Pegawai BPR Angkatan 1	5	12
21	Pemasaran Dana untuk BPR Angkatan 3	10	23
22	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR Angkatan 1	8	19
23	Penerapan SAK ETAP untuk BPR Angkatan 6	17	36
24	Penetapan Harga Pinjaman (<i>Loan Pricing</i>) Angkatan 3	6	14
25	Rencana Bisnis BPR Angkatan 3	2	8
26	<i>Service Excellence</i> untuk Karyawan BPR Angkatan 5	5	7
27	<i>Service Excellence</i> untuk Karyawan BPR Angkatan 6	3	11
Jumlah		222	541



2. Program *Inhouse*

Tahun 2017 PKM berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa BPR dan insitusi lainnya untuk menyelenggarakan 14 program *inhouse*, dengan jumlah peserta berpartisipasi sebanyak 1277 orang. Terdapat 15 institusi yang bekerja sama, yaitu yang terdiri dari 13 BPR, 1 yayasan, dan regulator. Tiga belas BPR tersebut adalah BPR Dana Nusantara, BPR Danamas Simpanpinjam, BPR Bhakti Daya Ekonomi Yogyakarta, BPR Sukabumi Sukabumi,

BPR Kerta Raharja Cikupa, Tangerang, BPR Difobutama, BPR Marcorindo, BPR Parasahabat Bekasi, BPR Dana Nusantara, BPR Parasahabat Bekasi, BPR Parasahabat Bekasi, BPR Supra Arthapersada Sukabumi, dan BPR Parasahabat Bekasi. Yayasan dan regulator yang bekerja sama adalah Yayasan Perbarindo Riau dan Kantor Regional 2 Jabar OJK. Program pelatihan *inhouse* yang terlaksana pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14. Realisasi Pelatihan *Inhouse* PKM 2017
Sumber : Data PKM(diolah)

No	Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Peserta
1	Service Excellence dan Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai BPR	BPR Dana Nusantara	40
2	Service Excellence dan Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai BPR	BPR Danamas Simpanpinjam	8
3	APU PPT untuk BPR	BPR Bhakti Daya Ekonomi Yogyakarta	21
4	Effective Leadership untuk Karyawan BPR	BPR Sukabumi Sukabumi	35
5	Service Excellence dan Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai BPR	BPR Kerta Raharja Cikupa, Tangerang	40
6	Analisa Kredit Komprehensif untuk BPR	BPR Difobutama & BPR Marcorindo	30
7	Service Excellence untuk BPR Angkatan 1	BPR Parasahabat Bekasi	80
8	Menyusun Remunerasi Pegawai BPR	Yayasan Perbarindo Riau	22
9	Effective Leadership untuk Karyawan BPR	BPR Dana Nusantara	58
10	Service Excellence untuk BPR Angkatan 2	BPR Parasahabat Bekasi	72
11	Service Excellence untuk BPR Angkatan 3	BPR Parasahabat Bekasi	96
12	Internal Audit untuk BPR/BPRS	Kantor Regional 2 Jabar OJK	240
13	Aspek Hukum Dalam Collection	BPR Supra Arthapersada Sukabumi	35
14	APU PPT untuk BPR	BPR Parasahabat Bekasi	500
Jumlah		15	1277

KONSULTANSI

Divisi Konsultasi dan *Assessment Center* (DKA)

Program yang diselenggarakan Divisi Konsultasi *Assessment Center* (DKA) terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu program publik dan non-publik. Program publik adalah program-program yang diselenggarakan di luar *core bussines* seperti workshop, sedangkan program non-publik adalah program-program inti.

Tahun 2017 telah terselenggara beberapa program inti, yaitu kegiatan konsultasi dan asesmen serta rekrutmen untuk 28 program.

Asesmen merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan, yakni sebanyak 10 kali. Selanjutnya adalah program rekrutmen 7 kali dan 4 kali penyelenggaraan workshop. Program workshop publik yang diselenggarakan adalah *Workshop Strategic Execution* dan *Workshop Penilaian Kemampuan*, serta 2 kali workshop *inhouse*, yaitu *Workshop Manajemen Kas dan Treasury* dan *Workshop Strategic Leadership*, seperti terinci berikut ini:

Tabel 5.15. Realisasi Program Divisi Konsultasi & *Assessment Center*
Sumber : Data DKA (diolah)

No	Perusahaan	Perusahaan
1	Asesmen Calon Direksi	Bank Lampung
2	Asesmen Calon Direktur Kepatuhan	Bank Sulsebar
3	Asesmen Calon Direktur Kepatuhan	Bank Jambi
4	Asesmen Calon Direktur Pemasaran	Bank Sumut
5	Asesmen Calon Dirut	Bank Lampung
6	Asesmen Calon SDP Semester 1	Bank BJB
7	Asesmen KCP	Bank BJB
8	Asesmen ODP	Bank BTN
9	Asesmen ODP Eksternal	Bank BTN
10	Jasa Konsultasi Manajemen Kepatuhan	Bank Kalteng
11	Kajian Investasi Jamkrida, BPR	Bank Riau Kepri
12	Pembekalan Fit & Proper	Bank Jatim
13	Pembekalan/Coaching Calon Komisaris	Bank Maspion
14	Penyusunan Corporate Plan Tahap 3 dan 4	Bank Nagari
15	Prohired Calon Pemimpin Divisi IT	Bank Sumut
16	Rekrutmen	Taspen
17	Rekrutmen	PD BPR Kerta Raharja
18	Rekrutmen	Bank Jateng
19	Rekrutmen GDP	Bank UOB
20	Rekrutmen ODP 4	LPPI
21	Rekrutmen ODP Angkatan 6	Bank DKI
22	Rekrutmen ODP Angkatan II	Bank Sumut
23	Review Corporate Plan	Bank Sulsebar
24	Studi Kelayakan Kantor Cabang Jakarta	BPD Bali
25	Work Load Analysis	Bank Riau Kepri
26	Work Load Analysis	Askrindo
27	Workshop Manajemen Kas dan Treasury	Bank Sulselbar
28	Workshop Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Publik
29	Workshop Strategic Execution	Publik
30	Workshop Strategic Leadership	Bank Riau Kepri

RISET

1. *Economic and Banking Outlook*

Tahun 2017 LPPI mulai melakukan riset mengenai *outlook* ekonomi dan perbankan (*economic and banking outlook*). Riset tersebut bertujuan untuk memberikan sebuah perspektif lain mengenai proyeksi perkembangan ekonomi yang akan terjadi di tingkat global, regional, dan nasional, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi industri perbankan yang selama ini menjadi fokus utama LPPI.

Perbankan nasional membutuhkan riset tersebut untuk dijadikan panduan dalam menjalankan operasional yang akan dituangkan dalam rencana kegiatan usaha bank jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasa disebut dengan RBB (Rencana Bisnis Bank). Publikasi hasil riset akan disampaikan secara triwulan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya LPPI memberikan kontribusi untuk industri perbankan nasional.

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

Riset berikutnya adalah mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) industri perbankan di Indonesia. Seperti diketahui, pada sejak 2007 bank wajib mengevaluasi penerapan GCG melalui *self assessment* yang dilakukan setiap tahunnya. Dari 11 kategori penilaian, akan menghasilkan nilai komposit berupa angka numerik dan nilai kualitatif yang dibagi menjadi 5 (lima) kriteria.

Riset ini akan mengkaji konsistensi bank dalam melakukan penilaian GCG sejak 2007 sampai 2016, kemudian data tersebut diolah menggunakan PCA (*Principal Component Analysis*), yaitu teknik untuk membangun variabel-variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli. Jumlah maksimum dari variabel-variabel baru ini akan sama dengan jumlah dari variabel lama, dan variabel-variabel baru ini tidak saling berkorelasi satu sama lain.

Hasil akhir riset ini diharapkan berupa skor yang akan menunjukkan ranking masing-masing bank.

Berdasarkan hasil riset tersebut, diharapkan para pelaku industri akan semakin berkomitmen menjalankan nilai-nilai GCG secara optimal di perusahaannya. Hal ini berkaitan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa penerapan nilai-nilai GCG berkorelasi dengan peningkatan kinerja sebuah perusahaan. Pada tahun 2017, riset GCG masih dalam tahap *collecting data* dan langkah berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2018.

3. KONSORSIUM DATA KERUGIAN EKSTERNAL (KDKE)

KDKE diluncurkan pada tanggal 21 September 2012 di Bank Indonesiadan mulai beroperasi penuh sejak 2 Januari 2013. Pada awal terbentuknya KDKE, terdapat 17 bank yang bergabung menjadi anggota, yaitu: Bank BCA, BNI, Bank BTN, Danamon, Permata, BTPN, Bukopin, Bank Sahabat Sampoerna, Bank BJB, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Nagari, Bank Sulselbar, BPD DIY, Bank BRI, Bank Jatim dan Commonwealth Bank.

Kehadiran KDKE didorong oleh keinginan industri perbankan nasional memiliki *database* khusus yang menghimpun data kerugian eksternal yang selama ini masih tersebar di bank masing-masing. Dengan adanya konsorsium ini diharapkan bank yang menjadi anggota mau berbagi data kerugian tersebut sehingga bisa menjadi pelajaran bagi bank lain. Sejak lima tahun beroperasi sudah terhimpun 1857 data dengan 1700 data yang terpublikasi (*published*).

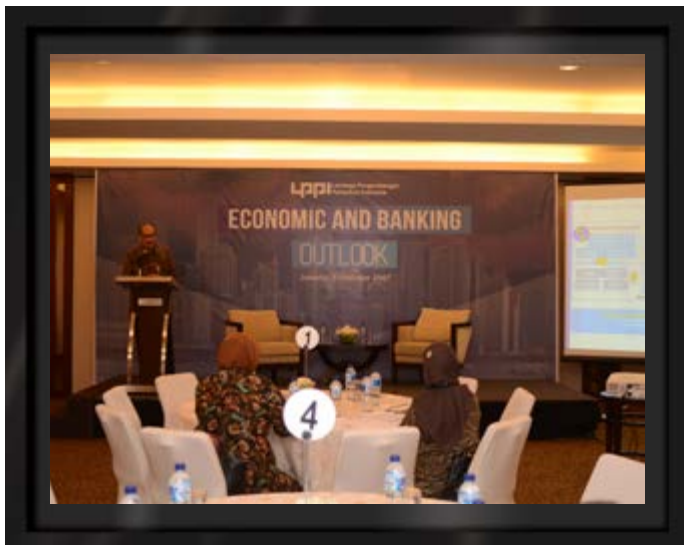
Untuk menunjang aktivitasnya, KDKE ditopang oleh sebuah sistem yang berfungsi mengolah data kerugian eksternal yang tersimpan di dalam *database* yang berasal dari seluruh anggota. Agar tingkat keamanannya semakin terjamin serta berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, diharapkan awal tahun 2018 KDKE sudah menggunakan sistem yang dibuat oleh vendor lokal.

Lintasan Peristiwa LPPI 2017



Jakarta, 28/12/2017 PELATIHAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM

LPPI memiliki pelatihan untuk Officer Development Program (ODP) yang dirancang untuk menyiapkan pemimpin perusahaan di masa depan. Tampak salah satu pelatihan ODP dari salah satu bank yang diselenggarakan LPPI.



Jakarta, 5/10/2017 ECONOMIC AND BANKING OUTLOOK

LPPI memiliki Divisi Riset dan Pengembangan Program. Salah satu output dari divisi itu adalah riset mengenai tinjauan ekonomi dan industri perbankan 2018. Riset itu kemudian disosialisasikan dalam bentuk seminar yang digelar Oktober 2017



Jakarta, 5/10/2017
KERJASAMA LPPI - PPATK

LPPI juga selalu memperhatikan kebutuhan industri terkait isu-isu manajemen risiko. Melalui Majalah Stabilitas, LPPI menggelar seminar risiko likuiditas pada Mei. Tampak para pembicara seminar berpose bersama beberapa peserta usai seminar tersebut.

Jakarta, 24/11/2017
KDKE MEMBER MEETING

Seminar Manajemen Risiko Teknologi
Informasi





PERESMIAN DAPUR BARU LPPI

Demi meningkatkan kualitas layanan LPPI membangun dapur yang lebih modern yang peresmian dilakukan langsung oleh Sesepeuh LPPI Bapak Rachmat Saleh. Nampak Bapak Rachmat Saleh sedang berbincang dengan salah satu petugas dapur.



INDONESIA EMPLOYEE ENGAGEMENT AWARD

LPPI juga memiliki perhatian kepada isu keterikatan karyawan pada perusahaan (employee engagement). Oleh karena itu pada Maret 2017, Majalah Stabilitas-LPPI mengelat acara Indonesia Employee Engagement Award pada industri keuangan. tampak dari kiri ke kanan, Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Rudiantara, Ketua Komisioner OJK Bapak Muliaman D Hadad, Chief Human Capital Officer Bank Mandiri, Sanjay Bharwani, dan Direktur Utama LPPI Bapak Hartadi A Sarwono

LPPI juga memiliki perhatian kepada isu keterikatan karyawan pada perusahaan (employee engagement). Oleh karena itu pada Maret 2017, Majalah Stabilitas-LPPI menghelat acara Indonesia Employee Engagement Award pada industri keuangan. tampak dari kiri ke kanan, Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Rudiantara, Ketua Komisioner OJK Bapak Muliawan D Hadad, Chief Human Capital Officer Bank Mandiri, Sanjay Bharwani, dan Direktur Utama LPPI Bapak Hartadi A Sarwono



Dalam menjalankan usahanya dalam menyediakan pelatihan bagi para pelaku industri keuangan, LPPI tidak melupakan tugasnya di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2017 ada beberapa kegiatan sosial yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan.

Kegiatan Sosial



Gema Ramadhan 1438

Pada Juni 2017 bersamaan dengan waktu Ramadhan 1438 H, LPPI memberikan santunan kepada 130 anak yatim di lingkungan RW 05 di mana kantor LPPI berada. Santunan itu diberikan langsung oleh Direktur Utama LPPI Hartadi A Sarwono dan juga Sesepuh LPPI Rachmat Saleh yang didampingi jajaran direksi lainnya.



Idul Fitri 1438

Menjelang Idul Fitri 1438 H, LPPI juga memberikan santunan paket kebutuhan pokok kepada kaum dhuafa terutama para janda dan jompo yang berada di lingkungan LPPI yang berjumlah 123 orang. Pemberian itu diberikan secara simbolis kepada para penerima untuk menghindari keramaian.



Idul Adha 1438 H

Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 1 September dirayakan oleh karyawan LPPI dengan sholat hari raya dan pemotongan hewan kurban. Adapun hewan kurban pada tahun ini terdiri dari 1 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Daging-daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar RW 05, di mana Kampus Bumi LPPI berada.



Ulang Tahun LPPI

Menjelang ulang tahun LPPI yang ke-59 yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2017, LPPI juga memberikan bantuan kepada para pensiunan LPPI sebagai bentuk rasa syukur lembaga kepada para karyawan-karyawan yang sudah purna tugas.

Dalam 59 tahun perjalanannya dalam memberikan pelatihan dan pendidikan perbankan di Tanah Air, LPPI telah bekerja sama dengan puluhan lembaga di sektor keuangan dalam dan luar negeri. Tujuannya hanya satu, memberikan pelatihan, konsultasi dan riset terbaik untuk klien. Bahkan LPPI telah menjadi anggota *Asian Pacific Association of Banking Institute (APABI)* sejak 2012.

Pelanggan LPPI





Beberapa Daftar BPR Pelanggan LPPI :

Bank Pasar Ronggolawe
BPR Amuntai Selatan
BPR Amuntai Utara
BPR Aneka Dana Raya
BPR Arfak Indonesia
BPR Arta Jakarta
BPR Artadamas Mandiri
BPR Artha Karya Perdana
BPR Artharindo
BPR Babakan
BPR Bank BAPAS 69 Kab. Magelang
BPR Bank Jombang
BPR Bank Pasar Bangli
BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung
BPR Bank Pasar Kota Cirebon
BPR Bank Surya Yudha
BPR BAPAS BOGOR
BPR BAPAS Cirebon
BPR Bekasi Bina Tanjung
BPR BePeDe Kutai Sejahtera
BPR Bestari
BPR Bina Maju Usaha
BPRBina Sejahtera Insani
BPR Bintan
BPR Bintara Pratama Sejahtera
BPR BKK Purwokerto
BPR BP Kota Bandar Lampung
BPR Bumi Prima Dhana
BPR Bumidhana
BPRCahaya Fajar
BPR Catur Artha Jaya
BPR Ciledug Dana Semesta
BPR Citra Dana Mandiri
BPR Citra Dumoga
BPR Citra Mas Panengkap
BPR Cosmic Mitra Andalan

BPR Dana Bintang Sejahtera
BPR Dana Pos
BPR Daya Lumbung Asia
BPR Daya Perdana Nusantara
BPR Delta Artha
BPR Depo Mitra Mandiri
BPR Dhana Lestari
BPR Dhana Sewu
BPR Dharma Pejuang 45
BPR Dian Farago Gemilang
BPR DPM Kredit Mandiri
BPR Duta Bali
BPRDuta Bhakti Insani
BPR Duta Pakuan Mandiri
BPR Duta Pasundan
BPRGamon
BPRGita Makmur Utama
BPR Gonjong Limo
BPR Guguk Mas Makmur
BPR Harapan Saudara
BPR Harau
BPR Hariarta Sedana
BPR Hasamitra
BPR Ingertad Bangun Utama
BPR Intidana Sukses Makmur
BPR Kab Bandung
BPR Kab Bulungan
BPR Kab Temanggung
BPRKencana Mandiri
BPR Kepri
BPR Kepri Bintan
BPR Kintamani Perdana
BPR Kreo Lestari
BPR Kuningan
BPR Kutai Timur
BPR Labuan Amas Selatan

BPR Lokadana Sentosa
 BPR LPN Sungai Rumbai
 BPR LPN Taeh Baruh
 BPR Majesty Golden Raya
 BPR Mandiri Artha Abadi
 BPR Mangun Pundiya
 BPR Markoni Saranajaya
 BPR Mitra Central Dana
 BPR Mitra Harmoni
 BPR Mitra Primalestari
 BPR Mitrabina Arta Makmur
 BPR Mitratama Artabuana
 BPR Mutiara Jaya Sukses
 BPR NBP 2 Jonggol
 BPR NBP 29 Pusaka Nagara
 BPR NTB Mataram
 BPR Nusa
 BPR Olympindo Primadana
 BPR Panca Artha Graha
 BPR Pancur Benua Khatulistiwa
 BPR Parasahabat Bekasi
 BPR Pariangan
 BPR Paringin
 BPR Pasar Kabupaten Temanggung
 BPR PD Bank Sleman
 BPR Pekanbaru
 BPR Pembangunan Nagari
 BPR Pinang Artha
 BPR Pitih Gumarang
 BPR PK Bongas
 BPR Pondasiniaga Perdana
 BPR Pondok Meja Indah
 BPR Prima Nadi Mataram
 BPR Prov Sulawesi Utara dan Manado
 BPR Raharja Wanayasa
 BPR Rangkiang Denai

BPR Rejeki Insani
 BPR Rizky Barokah
 BPR Rokan Hulu
 BPR Ronabasa
 BPR Sago Luhak Lima Puluh
 BPR Semoga Jaya Artha
 BPR Sentral Arta Asia
 BPR Sentral Arta Sejahtera
 BPR Sentral Artha Jaya
 BPR Shinta Daya
 BPR Sri Gemilang
 BPR Sukabumi
 BPR Suliki Gunung Mas
 BPR Sungai Pandan
 BPR Supra Arthapersada
 BPR Supra Wahana Artha
 BPR Surya Yudha Kencana
 BPR Tamara Dana Khatulistiwa
 BPR Tanaoba Lais Manekat
 BPR Terabina Seraya Mulia
 BPR Trisurya Bumindo
 BPR Tunas Jaya Global
 BPR Tunas Mitra Mandiri
 BPR Unisritama
 BPR Universal
 BPR Universal Kalbar
 BPR Universal Mega Mandiri
 BPR Utomo Manunggal Sejahtera
 BPRS Al-Makmur
 BPRS Ampek Candung
 BPRS Bangka Belitung
 BPRS Haji Miskin
 BPRS Lampung Timur
 BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Kerjasama Internasional



Australian Institute
of Management

AUSTRALIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (AIM)

- Manajemen Perbankan
- Management of Change



Institut Bank-Bank Malaysia
Institute of Bankers Malaysia

INSTITUTE BANK-BANK MALAYSIA (IBBM)

- Analisa Kredit
- Trade Financing



Belgian
Bankers
Academy

BELGIAN BANKER'S ACADEMY (BBA)

- Banking Simulation
- Branch Simulation
- Credit Strategy



THE GLOBAL UNIVERSITY OF ISLAMIC FINANCE

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION IN ISLAMIC FINANCE (INCEIF)

- Seminar Perbankan dan Keuangan Syariah



INTERNATIONAL CENTER FOR LEADERSHIP IN FINANCE (ICLIF)

- Leadership in Finance
- Leadership on Change



AIF
ASIAN INSTITUTE OF FINANCE

MOU DENGAN ASIAN INSTITUTE OF FINANCE (AIF)

- Seminar
- Case studies



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

LEMBAGA PEMERINTAHAN JERMAN

- Pembuatan modul Green Banking



MENJADI ANGGOTA ASIAN PACIFIC ASSOCIATION OF BANKING INSTITUTE (APABI) TANGGAL 10 MEI 2012 DI KUALA LUMPUR

LAINNYA :

- Financial Access Capital Netherlands
- Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA)
- Appui au Développement Autonome (ADA) of Luxembourg
- Islamic Research and Training Institute (IRTI)
- Islamic Economics Unit College of Business Administration Kuwait University
- Kementerian Luar Negeri



Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia

Jl. Kemang Raya No. 35,
Jakarta Selatan 12730
PO. Box 6708/JKSRB

Telp. (62-21) 7179 0919
Fax. (62-21) 7195 409

www.lppi.or.id